

**STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ENREKANG**

HARDIANA

Nomor Stambuk : 10561 04623 13



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**STRATEGI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ENREKANG**

HARDIANA

10561 04623 13

Skripsi

*Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan
Guna memperoleh gelar sarjana program studi ilmu administrasi Negara
fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah makassar*

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Enrekang

Nama Mahasiswa : HARDIANA

Nomor Stambuk : 10561 04623 13

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui :

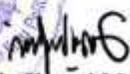
Pembimbing I


Dr. Hj. Badi Setiawati, M.Si

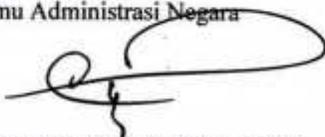
Pembimbing II


Dr. Muhammad Tahir, M.Si

Mengetahui :


Dekan
Fisipol Unismuh Makassar

Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos., Ms.i

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara

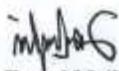

Nasrulhaq Svarif, S.Sos., MPA

PENERIMA TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan Menguji Ujian Skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1327/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi ilmu administrasi Negara di makassar pada hari selasa tanggal 20 agustus tahun 2018

TIM PENILAI

Ketua



Dr. Hj. Ihyani Malik S.Sos, M.Si

Sekretaris



Dr. Burhanuddin S.Sos, M.Si

Penguji

1. Dr. H. Muhammadiyah, MM (ketua)
2. Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si
3. Dr. Abd Mahsyar, M.Si
4. Drs. H. Ansyari Mone, M.Pd



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Hardiana

Nomor Stambuk : 10561 04623 13

Program studi : Ilmu Administrasi Negara

Benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apa bila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku.

Makassar, 15 Januari 2018

Yang Menyatakan

Hardiana

MOTTO

“Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan, jika keyakinan kita cukup besar dan tindakan kita selaras dengan keyakinan kita, sebab apapun bisa diciptakan dan diyakini bisa dibuat menjadi kenyataan”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Segala puji dan syukur kepada sumber suara-suara hati yang bersifat mulia dan suci, sumber segala ilmu pengetahuan, sumber dari segala kebenarannya, sang maha cahaya penabur cahaya ilham pilar nalar kebenaran dan kebbaikannya yang terindah sang kekasih tercinta yang tak terbatas pencahayaan cintanya kepada ummatnya Allah Subuhanahuwata'ala. Salam serta salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam nabi yang terakhir diutus kepermukaan bumi ini untuk memberikan pengetahuan kedahsyatan al-Islam.

Penulis, menyadari bahwa sejak penyusunan proposal, banyak hambatan, rintangan dan halangan, terutama terbatasnya literatur dan sumber-sumber penunjang lainnya. Namun dengan tekad yang kuat serta dorongan yang besar dari diri pribadi, maka penuli akan menyelesaikan proposal ini dengan judul : “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang”. Sebagaimana manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan dan juga kesalahan, penulis mengharapkan kritik yang membangun kepada semua pembaca sehingga dapat melengkapi dan menyempurnakan karya tulis ini.

Selama menyusun skripsi ini maupun dalam mengikuti kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Makassar banyak sekali pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada punuis. Pada kesempatan

ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Allah SWT, atas segala kemudahan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dn ucapan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, memberikan saran, semangat dan do'a. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H ABD. Rahman Rahim, S.E.,MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Hj. Budi Setiawati, M.Si selaku Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar yang banyak memberikan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Burhanuddin S.Sos. M.Si selaku Wakil Dekan I Ilmu Administrasi Negara yang banyak memberikan dorongan dan motivasi serta membantu mengarahkan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Bapak Nasrulhaq S.Sos., MPA Selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara, telah banyak memberikan masukan dan saran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak da Ibu Dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar khususnya yang membidangi ilmu administrasi Negara atas ilmu dan kesediaannya memimbing serta menata pola pikir selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Para Staf Akademik, Jurusan, maupun para Staf Administrasi Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak membantu proses akademik dan administrasi selama perkuliahan.

7. Kepala dinas beserta staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, yang dengan tulus membantu bekerja sama dengan baik selama proses penelitian berlangsung guna menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ridwan dan terkhusus Ibunda Cida sebagai orang tua yang berperan ganda memenuhi segala kebutuhan moril dan materil, yang selalu ada memberikan dukungan, motivasi dan Do'a dan dengan sabar mendengar keluh dan kesah ananda hingga sampai pada tahap akhir proses penyelesaian skripsi ini, Kalian adalah power terbesarku.
9. Kepada kakanda saya tercinta Asri S.Sos saudara saya, sekaligus Ayah untuk kami. Yang telah banyak berkorban sehingga saya dapat sampai ke titik terakhir penyelesaian skripsi ini. Terimah kasih atas semuanya.
10. dan Adinda saya tercinta Hendryanto yang senantiasa memberikan support dorongan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada Adik sekaligus sahabat saya Nurhasira masita yang senantiasa ada membantu, mensupport dan memberi motivasi serta semangat yang tiada henti hingga sampai pada tahap akhir penyelesaian skripsi ini. Terima kasih sudah banyak meluangkan waktunya.
12. Terima kasih banyak kepada kak Hikma yang banyak membantu saya, mendorong dan menyemangati saya hingga tahap proses penyelesaian skripsi ini.
13. Kepada sahabat saya sekaligus guru saya Ruslan S.E yang telah banyak memberikan sumbangsi ilmu, saran serta dorongan semangat dan setia menemani dari maba sampai pada tahap penyelesaian ini.

14. Teman-teman ADN-A yang banyak memberi support dan semangat dan setia menemani dari maba sampai sekarang
15. Teman-teman Organisasi IMM, BEM FISIPOL, HPMM, AMII, IFLC, IFL kakanda dan adinda yang belum sempat saya sebut satu persatu terima kasih atas semua bantuan dan dorongannya.

Skripsi ini belum dapat di katakana sempurna tanpa kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Harapan kami semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan digunakan semestinya bagi semua pihak.

Makassar, 29 Agustus 2018

Peneliti

ABSTRAK

Hardiana, 105610462313. *Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.* Di bimbing oleh Budi Setiawati (Pembimbing 1) dan Muhammad Tahir (Pembimbing 2)

Strategi pemberdayaan perempuan merupakan salah satu program pemerintah sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih maju. Tujuan dari penelitian adalah ini untuk mengetahui proses strategi pemberdayaan perempuan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Data yang digunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder, data tersebut di analisis secara deskriptif kualitatif yang berhasil dikumpulkan penulis dan selanjutnya ditampilkan dalam bentuk kalimat sesuai dengan wawancara dari 10 informan. Penelitian menggunakan tipe fenomenologis. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat yang terkait dalam hal ini yaitu: (1) partisipasi perempuan sudah baik, (2) program yang dilaksanakan belum maksimal, (3) kesadaran perempuan masih kurang, (4) sosialisasi yang tidak merata diseluruh lapisan masyarakat.

Harapan kedepan bahwa melalui strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang mengenai strategi pemberdayaan perempuan dapat di laksanakan dilakukan secara bertahap dan bekesinambungan serta pembinaan terhadap perempuan harus terus di tingkatkan.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan Perempuan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Strategi pemberdayaan.....	8
1. Pengertian Strategi	8
2. Proses Strategi.....	12
B. Konsep Strategi Pemberdayaan Perempuan.....	14
1. Strategi Pemberdayaan.....	14
2. Pemberdayaan Perempuan	19
3. Tahap-Tahap Pemberdayaan.....	23
4. Tujuan Pemberdayaan.....	25
C. Indikasi kekerasan terhadap perempuan	26
1. Penyebab kekerasan terhadap perempuan.....	27
2. Dampak kekerasan terhadap perempuan	29
D. Kerangka Pikir	30
E. Fokus Penelitian	32
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	33
 BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	35
C. Sumber Data.....	37
D. Informan Penelitian.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengabsahan Data	42
 BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	

A. Deskripsi Atau Karakteristik Objek Penelitian.....	44
1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang	44
2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang	44
B. Keadaan Demografi.....	45
1. Jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang Tahun 2018.....	45
2. Struktur Organisasi	46
3. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.....	47
4. Karakteristik informan.....	51
C. Strategi pemberdayaan perempuan.....	52
1. Bimbingan konseling	56
2. Pemberdayaan Kelompok	58
3. Membentuk Kelompok Usaha.....	60
4. Memotivasi Perempuan.....	62
5. Peningkatan Kesadaran Pelatihan Kemampuan.....	64
6. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan	67
D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang	69
A. Faktor Pendukung	69
1. Melakukan Sosialisai	69
2. Partisipasi Perempuan	71
3. Kerjasama Lintas Sektor	72
B. Faktor Penghambat.....	73
1. Kurangnya Kesadaran Perempuan	74
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana.....	75
3. Beban dan Peran Ganda	77
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran-saran	80
 DAFTAR PUSTAKA	82
 LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai salah satu pelaku pembangunan di Daerah yang merupakan bagian dari Pembangunan Nasional dimana Pembangunan pada dasarnya adalah upaya sadar untuk memanfaatkan potensi yang layak memecahkan permasalahan yang dihadapi sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat kearah yang lebih baik dan lebih maju. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah swasta dan masyarakat di Kabupaten Enrekang sangat tergantung pada peran seluruh penduduk baik laki-laki maupun perempuan (kesetaraan gender). Selain dari pada pelaku terhadap proses pembangunan dikabupaten enrekang, perempuan juga sebagai pemanfaatan hasil akhir dari pembangunan. Pemberdayaan pada hakikatnya adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengembangkan dan membangun eksistensi terhadap pribadi, keluarga dan masyarakat didalam proses aktualisasi peran yang sama sebagai bagian dari sosial masyarakat.

Indikasi penelitian dalam pemberdayaan perempuan yaitu masih banyak terjadi kekerasan perempuan yang merugikan perempuan, dan ada beberapa masyarakat khususnya di Kabupaten Enrekang kurang memahami tentang Pemberdayaan Perempuan sehingga pelaksanaannya kurang efektif dan maksimal,

bagaimana masyarakat merasa pemberdayaan bukan sesuatu hal yang penting sehingga kemauan untuk terlibat tidak ada. Dengan adanya masalah tersebut tentu membawa pengaruh terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Enrekang. Oleh sebab itu pemerintah perlu memikirkan hal ini secara serius serta upaya melakukan pengoptimalan peningkatan strategi pemberdayaan perempuan, sehingga perempuan dapat di berdayakan dengan maksimal, untuk meningkatkan strategi pemberdayaan perempuan di Daerah secara khusus dan Kabupaten Enrekang secara umum sebagaimana pemberdayaan erat kaitannya dengan keberhasilan pembangunan di suatu daerah.

Isbandi Adi, (2013) Pemberdayaan perempuan dalam konteks sosial merupakan upaya proses pembangunan dimana perempuan harus selalu berinisiatif untuk melakukan proses kegiatan sosial yang dapat memperbaiki situasi dan kondisi dalam suatu masyarakat sehingga dapat pemeratakan dan meningkatkan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan pemberdayaan perempuan menjadi hal yang sangat penting.

- 1) Pembangunan dengan perspektif partikal mengakibatkan perempuan menjadi tidak berdaya karena tidak dapat mengekspresikan kemampuan/bakat yang dimilikinya.
- 2) Tingkat pendidikan terhadap perempuan cenderung lebih rendah ketimbang laki-laki dan hak reproduksi yang cenderung dipaksakan.
- 3) Ketertinggalan peran perempuan didalam bidang pemerintahan dan politik.

Agar semuanya berjalan dengan seimbang maka diperlukannya upaya untuk melakukan suatu pemberdayaan terhadap perempuan agar mereka mempunyai akses dan kontrol terhadap semua aspek pembangunan yang tujuan akhirnya adalah kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dan peningkatan pemberdayaan di suatu Daerah. Selain pemahaman perempuan tentang peraturan daerah pemahaman perempuan tentang pemberdayaan perempuan masih sangat kurang sehingga menjadi faktor penghambat keberhasilan perempuan dalam pembangunan. Pemerintah telah melakukan berbagai program yang melibatkan kaum perempuan salah satunya dimuat dalam Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 321 Tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang sebagaimana Pada era globalisasi saat ini, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan isu strategis yang menjadi perhatian dunia.

Berbagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi anak terus dikembangkan. Dalam mencapai upaya ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan peran secara optimal. Namun dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang harus fokus melakukan kegiatan untuk menjawab persoalan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh perempuan dan anak di Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan.
2. Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3. Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak.
4. Masih terdapat peraturan dan kebijakan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak.
5. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak, termasuk ketersediaan data dan rendahnya partisipasi masyarakat.

Pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk kebijakan untuk memberdayakan salah satunya adalah pemberdayaan perempuan yang di atur dalam Keputusan Bupati Enrekang Nomor : 321 Tentang Rencana Strategis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang. Dalam rangka pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat perbandingan yang terjadi setiap tahunnya.

Pada tahun sebelumnya 2010-2013 jumlah kekerasan perempuan yang terjadi jauh lebih rendah berkisar 98 kasus yang terjadi dalam kurun waktu 4 tahun dibandingkan pada tahun 2014-2017 mencapai 138 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa banyak kaum perempuan.

Tingkat kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten Enrekang adalah salah satu masalah yang kian di rasakan kaum perempuan sehingga wujud dari strategi pemberdayaan perempuan merupakan solusi untuk memperbaiki konstruksi jastis dan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang di rasakan kaum perempuan khususnya di Kabupaten Enrekang. Realisasi pemberdayaan perempuan yang ingin dicapai untuk menekan angka kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di Kabupaten Enrekang melalui pemberdayaan perempuan sebagaimana

tingkat kekerasan yang dialami kaum perempuan cukup komplis, sebagaimana yang terdapat pada Tahun 2014-2017, dimana pada beberapa tahun tersebut tingkat kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Enrekang terus meningkat mencapai 138 total kasus kekerasan yang banyak menimpa kaum perempuan menengah kebawah (miskin). DP3A, (28/2018).

Meningkatnya kekerasan perempuan tersebut sehingga menimbulkan beberapa faktor terhadap pelaksanaan pemberdayaan perempuan dimana akan berdampak pada perceraian karena faktor ekonomi, perempuan banyak yang memilih menikah dibawah umur dan juga berakibat pada ketimpangan terhadap pembangunan. Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa salah satu keberhasilan suatu daerah jika program-program yang dilakukan oleh pemerintah berhasil. Dengan demikian perlu adanya perhatian secara bertahap dengan melaksanakan program-program yang bersentuhan dengan pemberdayaan perempuan sehingga memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada perempuan dengan cara itu, perempuan dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Lebih dari itu, kaum perempuan dapat ikut serta membangun keluarga dan lingkungan serta mengembangkan sifat jiwa kewirausahaan melalui gerakan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Strategi pemberdayaan perempuan berpijak pada filosofi pembangunan yang menjadikan kaum perempuan sebagai mitra sejajar dengan kaum laki-laki. Berdasarkan dari uraian di atas penulis berkeinginan untuk melakukam penelitian

dengan judul “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji adalah:

1. Bagaimana strategi pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang di tinjau dari bimbingan konseling, pemberdayaan kelompok, membentuk kelompok usaha, memotivasi perempuan, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, pembangunan dan pengembangan jaringan ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian ini adapun tujuan yang ingin di capai:

1. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrkang.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian nantinya dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran akademik dan studi perbandingan penelitian selanjutnya serta menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian ilmiah sebagai

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah strategi pemberdayaan perempuan.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian yang akan dilakukan yaitu dapat dijadikan sebagai suatu bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Enrekang dalam melakukan usaha dalam meningkatkan partisipasi perempuan diberbagai bidang khususnya pada hal yang meyangkut tentang Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Pemberdayaan Perempuan

1. Pengertian Strategi

Strategi ialah sebuah taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah ditentukan oleh sekelompok orang. Strategi secara *Etimologi* berasal dari kata *strategia* yang merupakan bahasa Yunani berarti “*the art of general*”. kalimat tersebut diartikan sebagai suatu seni yang biasa digunakan oleh panglima dalam sebuah peperangan tujuannya supaya kelompoknya bisa menang. Namun, pengertian strategi tentunya tidak sederhana dimasa sekarang. Banyak ahli yang memberikan definisi dari strategi secara umum berkaitan dengan sebuah organisasi.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang realities dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Peranan aktif manajer sebagai perencanaan strategi merupakan hal utama yang wilayah fokusnya luas dan berjangka panjang. Strategi dapat digolongkan sebagai “penciptaan hubungan baik dengan manusia” antara lain adalah strategi: integrasi melalui penggabungan (*marger*), sistem kontrak (*join ventures*) kooptasi (*cooptation*) dan mengadopsi orang penting dari lingkungan (*interlocking directorates*)

Siagian (2004), memberikan definisi strategi yaitu pola keputusan sebagai tindakan mendasar yang digunakan dan dibuat oleh manajemen puncak kemudian di implementasikan oleh seluruh jajaran organisasi hasil akhirnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Strategi merupakan sebuah cara atau pendekatan yang menyeluruh dan juga erat kaitannya dengan suatu pelaksanaan, terhadap gagasan atau perencanaan terhadap aktivitas yang berada dalam beberapa kurun waktu tertentu. Untuk mendapatkan metode strategi yang baik dan efektif tentu saja dibutuhkan koordinasi atau tim kerja yang memiliki misi dan sasaran yang sama untuk dapat melakukan identifikasi terhadap hal-hal yang memiliki kesesuaian dengan prinsip untuk melaksanakan kegiatan yang baik dan rasional serta efisien baik itu dalam pendanaan dan mendapatkan taktik demi tercapainya tujuan yang efektif.

Strategi pada dasarnya adalah suatu kegiatan komperenshif yang gunakan untuk menentukan petunjuk dan pengarahan secara baik terhadap pengalokasian sumber daya yang mendukung untuk mencapai sasaran jangka panjang atau jangka pendek. Organisasi dalam prakteknya merupakan sesuatu yang kompleks dan tugas yang berisiko karena strategi yang digunakan dalam suatu organisasi diharapkan dapat menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang kompetitif. Pada proses perumusan strategi ada dua perspektif yang berbeda, perspektif pertama strategi merupakan program yang luas untuk mendefinisikan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi dan melaksanakan misinya. Strategi bertujuan untuk melihat sejauh mana peranan aktif organisasi untuk melaksanakan program-program sebagai strategi organisasi untuk menghadapi tantangan dan berbagai perubahan lingkungan yang

terjadi pada masa mendatang. Strategi ini dikenal sebagai perencanaan strategi, Perspektif yang kedua yaitu strategi sebagai pola tanggapan organisasi yang dilakukan terhadap kondisi lingkungan pada kurun waktu tertentu. fokus dari strategi ini untuk mengarahkan organisasi agar lebih bersikap pasif dan realistis untuk terus digunakan, yang artinya manajer akan selalu menanggapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan jika sewaktu-waktu mereka merasa perlu untuk melakukannya. Biasanya strategi ini dikenal dengan strategi adaptif (beradaptasi).

a) Strategi Menurut Para Ahli

1. Pearce dan robinson (1997) strategi adalah suatu rencana yang berskala besar dan berorientasi pada masa yang akan datang sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan dan persaingan guna mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
2. Mulyadi (2001) strategi pada dasarnya merupakan tindakan utama yang dipilih dan di implementasikan untuk mewujudkan visi organisasi.
3. Stephanie K. Marrus (1995) strategi di definisikan sebagai proses penentuan yang direncanakan oleh pemimpin puncak yang difokuskan pada tujuan jangka panjang organisasi.
4. David, Fred R. (2004) Strategi merupakan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan merupakan tindakan yang menuntut keputusan manajemen puncak.

J. Salusu (2006) strategi adalah seni menggunakan kecakapan, sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan.

beberapa strategi yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

1) Strategi organisasi

Strategi ini berkaitan dengan tujuan, nilai-nilai misi dan inisiatif strategi yang baru, pemantauan-pemantauan diperlukan mengenai apa yang harus dilakukan.

2) Strategi program

Strategi ini bertujuan untuk memberi perhatian pada implikasi dari suatu program-program tertentu. Strategi ini memusatkan perhatian untuk memaksimalkan sumber-sumber daya yang tersedia guna meningkatkan kualitas organisasi yaitu berupa tenaga kerja, modal, teknologi dan sebagainya.

3) Strategi kelembagaan

Fokus dari strategi kelembagaan ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk memaksimalkan inisiatif-inisiatif strategi.

b) Martin, (1988) Adapun ciri-ciri strategi yaitu :

1. Waktu strategi menggambarkan sebuah proses kegiatan dengan jangka panjang atau pandangan ke depan yaitu waktu untuk melaksanakan program dan melihat hasilnya.
2. Dampak terhadap Strategi ini berkaitan erat dengan tujuan, nilai-nilai, misi, sumber daya yang digunakan dan inisiatif akan sangat berpengaruh pada hasil akhirnya.

3. Pemusatan upaya yang dibutuhkan dengan memfokuskan program untuk melaksanakan kegiatan sehingga mengharuskan pemusatan terhadap pemanfaatan sumber daya.
4. Keputusan strategi yang dipilih memfokuskan pada sederetan keputusan-keputusan yang layak untuk diimplementasikan sepanjang waktu tertentu.
5. Peresapan strategi mencakup alokasi, program dan sumber daya sampai kegiatan operasional.

2. Proses Strategi

David (2011) Manajemen strategi merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang berhubungan dengan struktur perencanaan dalam pengembangan kebijakan dan mengalokasikan sumber daya sebagai penentu keberhasilan organisasi. Manajemen secara ideal dikonstruksikan untuk mengatur strategi dan mengkombinasikan berbagai aktivitas sebagai bagian pada fungsional untuk mencapai sasaran organisasi. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) pada prespektif organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kemampuan manusia yang didalamnya mencakup yaitu: pengembangan pelatihan kesehatan dan gizi serta kesempatan kerja dan kehidupan politik yang bebas sebagaimana sebuah organisasi tanpa strategi bagaikan kapal tanpa kemudi bergerak berputus tanpa lingkaran. Strategi merupakan langkah awal untuk merumuskan apa yang menjadi kebutuhan organisasi kedepannya.

UNDP, (2001) tiga pendekatan strategi mencakup yaitu ;

1. Perumusan strategi

Perumusan strategi termasuk di dalamnya, adalah pengembangan tujuan, mengenali peluang dan ancaman eksternal, menetapkan suatu objektivitas, menghasilkan strategi alternatif, memilih strategi untuk dilaksanakan. Perumusan strategi ditentukan oleh tindakan mendasar untuk menghindari, memutuskan, memperluas, atau melakukan suatu keputusan dalam suatu proses kegiatan.

2. Pengimplementasian strategi

Implementasi strategi termasuk adanya pengembangan yang mendukung pengambilan keputusan agar dapat menetapkan tujuan serta membuat dan mengimplementasikan suatu kebijakan sebagai pemanfaatan diberbagai sistem informasi. Implementasi sering disebut tahapan tindakan, karena implementasi berarti mobilisasi manusia yang ada dalam sebuah strategi yang dirumuskan menjadi tindakan. Tahap ini merupakan tahap paling sulit karena memerlukan kedisiplinan, komitmen, pengorbanan serta kerja sama yang merupakan kunci dari berhasil atau tidaknya tindakan.

3. Evaluasi strategi

Evaluasi adalah tahap akhir strategi ada tiga tahap aktivitas mendasar untuk mengevaluasi strategi;

- a) Menuju faktor-faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang menjadi dasar asumsi pembuat strategi.

- b) Melihat dan mengukur prestasi (membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan)
- c) Mengambil tindakan kreatif untuk memastikan bahwa prestasi diluar rencana. Untuk mengambil tindakan kreatif tidak harus berarti bahwa strategi yang sudah akan ditinggalkan bahkan strategi baru harus dirumuskan. Seperti gagasan David dalam Rahmayant, (2015) bahwa:

“Didalam pengambilan keputusan strategi tindakan kreatif diperlukan, jika tindakan atau hasil tidak sesuai dengan yang dibayangkan atau pencapaian yang direncanakan maka disitulah tindakan kreatif dilakukan”.

Segala tindakan kreatif harus konsisten secara internal dan bertanggung jawab secara sosial, evaluasi diperlukan karena keberhasilan hari ini merupakan jaminan keberhasilan dimasa depan sehingga evaluasi strategi sangat penting untuk memastikan hasil dari sasaran yang telah dicapai.

B. Konsep Strategi Pemberdayaan Perempuan

1. Strategi Pemberdayaan

Strategi pemberdayaan ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat agar mampu berdaya sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan aksesibilitas pada semua bidang. Namun keberhasilan pemberdayaan tidak sekedar menekan kepada hasil, tetapi juga pada prosesnya melalui tingkat partisipasi yang tinggi, yang berbasis pada kebutuhan dan potensi yang di miliki. Meraih keberhasilan agen pemberdayaan dapat melakukan pendekatan *bottom-up*. Dengan cara menggali potensi masalah dan kebutuhan kaum perempuan. Potensi atau kebutuhan tersebut tentu saja sangat beragam, sehingga agen pemberdayaan dapat menentukan skala

prioritas yang dipandang sangat perlu untuk dikembangkan. Kondisi yang menjadi acuan pemberdayaan untuk menentukan perencanaan pemberdayaan adalah (tujuan, materi, metode, alat, evaluasi) yang dirumuskan bersama-sama dengan klien/sasaran.

Sugihastuti, (2007) Strategi pemberdayaan dapat melalui pendekatan individual, kelompok atau kolektif dengan saling memberdayakan perempuan mitra seajar pria dengan menggunakan pendekatan perempuan dan laki-laki yang saling menghormati sebagai manusia, saling mendengar dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehingga menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tetap berkepribadian. Inferioritas, stereotipe dan marginalisasi terhadap perempuan adalah salah satunya dapat ditemukan dalam sistem pembagian kerja yang menyangkut fungsi dan peran perempuan. Terdapat pemahaman yang menyatakan bahwa perempuan tidak hanya berperan sebagai istri, dan ibu rumah tangga bagi keluarga, tetapi juga secara sosial dan budaya dalam lingkup yang lebih luas.

Tahap penyusunan rencana strategi yang berkaitan dengan strategi pembangunan diperlukan koordinasi untuk menghindari inkonsistensi antarpola pikir perencanaan yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Dalam proses perencanaan strategi pemberdayaan harus memproyeksikan saran-saran pembangunan sektor di dalam pencapaian sasaran sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana strategi.

Wahib, (2012) Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberdayakan kaum Perempuan sebagai berikut:

a) Keterampilan

Keterampilan adalah akses kehidupan mobilitas profesional perempuan sehingga dengan dibekali keterampilan memungkinkan seorang perempuan akan berkembang dengan sempurna karena keterampilan terletak pada segala aktivitas dalam kehidupan, dalam bidang apapun keterampilan dan kemampuan perlu dikuasai oleh seorang perempuan untuk menjadikan dirinya semakin berkualitas. Pemberdayaan Perempuan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan pada proses pelaksanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan Perempuan yang salah satu kegiatannya adalah Pelatihan Keterampilan, hal ini dilakukan untuk mengembangkan dan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk perempuan berperan dalam pembangunan ekonomi.

b) Pembinaan

Memberdayakan perempuan melalui pembinaan adalah sebuah upaya di berbagai bidang-bidang sesuai dengan karakter organisasinya masing-masing membina dengan proses, pembuatan, pembaharuan, cara, penyempurnaan, dan usaha tindakan pada kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai orientasi tujuan yang lebih baik hal ini merupakan hal yang penting sebab sangat menentukan kesinambungan tujuan pembangunan hidup

perempuan dalam berbagai bidang pembangunan sehingga melahirkan kaum perempuan yang berkualitas dan mandiri.

c) Pendidikan

Memberdayakan kaum dengan cara Perempuan harus diberikan pelatihan, pendidikan agar mereka memiliki kemampuan. Pada dasarnya pendidikan bertujuan untuk membekali kaum perempuan untuk dapat bersaing sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Edi Suharto, (2000) Konteks pekerjaan sosial strategi pemberdayaan

Perempuan dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Pemberdayaan dilakukan melalui bimbingan konseling bertujuan untuk melatih dan membimbing individu dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. hal ini digunakan sebagai pendekatan yang berorientasi pada tugas.
- 2) Pemberdayaan dilakukan terhadap kelompok. Pemberdayaan ini digunakan sebagai media intervensi sebagai wujud nyata bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pendidikan pelatihan adalah pendekatan kelompok yang digunakan sebagai strategi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap anggota agar memiliki kemampuan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Membentuk kelompok usaha. Strategi ini digunakan perempuan agar dapat mengembangkan mempertahankan eksistensi dan posisinya melalui kelompok

usaha bersama. Hal ini untuk Meminimalkan persaingan di antara perempuan dan memperkuat modal usaha dalam kelompok.

- 4) Memotivasi perempuan, melalui pendekatan ini perempuan dapat memahami tentang kebersamaan, nilai interaksi sosial termasuk didalamnya adalah pemahaman akan haknya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat.
- 5) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, peningkatan kesadaran perempuan dapat dicapai melalui pendidikan sejak dasar.
- 6) Pembangunan dan Pengembangan jaringan, pengorganisasian terhadap kelompok perempuan dengan cara meningkatkan kualitas kemampuan anggotanya, membangun kerja sama dan memperluas jaringan sosial disekitarnya.

Fakih, Mansour, (1996) Pendekatan pemberdayaan perempuan adalah proses kesadaran terhadap pembentukan kapasitas dan partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan, membuat keputusan, melakukan pengawasan dan transformasi sehingga perempuan bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Proses pemberdayaan perempuan adalah suatu upaya untuk mewujudkan akses, peran yang sama di semua bidang pembangunan. Program yang diimplementasikan oleh masyarakat dan pemerintah selama ini melalui strategi pemberdayaan perempuan merupakan suatu upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan bagi perempuan dan laki-laki secara berimbang.

2. Pemberdayaan Perempuan

Tikson (2002) Pemberdayaan perempuan yaitu memberi kesempatan dan mendorong individu untuk mengambil bagian dan tanggung jawab baik perorangan ataupun kelompok guna meningkatkan kemampuan dalam memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi. Pemberdayaan perempuan merupakan cara yang dapat ditempuh untuk menggali dan mengembangkan potensi perempuan agar berkualitas dan produktif sebagai langkah awal untuk memberikan kesempatan mengambil tanggung jawab guna meningkatkan dan memberikan kontribusi organisasi. pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan upaya optimalisasi potensi perempuan secara umum dengan memberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam masyarakat dan pemerintah agar dapat berkontribusi penuh terhadap pembangunan di Daerah. Konsep strategi pemberdayaan lebih menampakkan kelabilan posisi perempuan sehingga peran perempuan didalam pemberdayaan perempuan lebih stabil karena bukan upaya pembandingan posisi berdasarkan jenis kelamin.

Sulaiman Asang, (2012) Pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan Paradigma baru pembangunan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membangun daya melalui;

1) Memotivasi

Memotivasi perempuan dalam proses pemberdayaan perempuan adalah mendorong menumbuhkan semangat untuk mempermudah melakukan

kegiatan pengembangan diri, agar dapat menggunakan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki.

2) Menggali potensi

Menggali potensi dalam pemberdayaan merupakan kebutuhan fisik untuk meningkatkan kualitas diri, potensi menekankan pada proses meningkatkan kemampuan, mendorong untuk dapat menentukan pilihan hidup merupakan upaya untuk memandirikan dan menyetarakan kaum perempuan (gender).

3) Membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki

Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman dan kesadaran untuk keterlibat mengorganisir diri agar lebih maju serta ada upaya meningkatkannya kearah yang yang lebih baik dari sebelumnya. Metode pada pemberdayaan perempuan bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan.

4) memberikan kesempatan berperan seluas-luasnya

Kontribusi perempuan tidak cukup hanya ditandai dalam bentuk uang, tenaga dan in-natural lainnya, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan.

Marwanti dan Astuti (2002) Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, negara, dan tata dunia melalui proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang diimplementasikan di berbagai kehidupan: pendidikan, politik, hukum dan lain sebagainya. Pemberdayaan merupakan unsur yang memiliki tiga pendekatan yaitu; kekuatan (*power*) di dalam dirinya, *power to*, yaitu kekuatan untuk berbuat; *power with*, yaitu kekuatan untuk membangun kerjasama; dan *power-within*, yaitu kekuatan dalam diri pribadi manusia. Sebagaimana diketahui, strategi dan upaya pemberdayaan perempuan pada khususnya dan pemberdayaan manusia pada umumnya, adalah salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian berbagai kalangan akhir-akhir ini karena kajian-kajian dari sudut pandang yang berbeda bahwa kaum perempuan tergolong didalam kelas, ras dan budaya, yang berbeda merupakan faktor-faktor determinan. Analisis gender sebagai sebuah contoh ilustratif mengenai bagaimana fertilisasi silang antara bantuan terhadap pembangunan.

Suyono, (2001) memberikan definisi tentang pemberdayaan perempuan yang sering pula disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup personal perempuan”, yaitu suatu upaya yang dilakukan untuk memberdayakan kehidupan perempuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, ekonomi, sosial, informasi, komunikasi, dan lain sebagainya agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan perempuan dilaksanakan melalui peningkatan peran, kedudukan terhadap perempuan dalam kehidupan bangsa dan negara, serta meningkatkan kualitas peran didalam organisasi perempuan, tetap menjaga nilai persatuan dan

kesatuan, menjaga sejarah perjuangan kaum perempuan tetap melanjutkan usaha pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan diperlukan perencanaan yang tersusun secara matang dan langkah selanjutnya adalah mobilisasi sumber daya yang diperlukan. Pada dasarnya penerapan nilai-nilai demokrasi pada program pemberdayaan perempuan dengan penerapan nilai-nilai demokrasi pada masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan pada intinya berupa dana (modal, sumber daya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan).

Adi isbandi, (2013) Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar pria adalah kondisi ketika laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesatuan, kedudukan, peranan dan saling membantu mengisi di semua bidang kehidupan.

Pemberdayaan perempuan adalah suatu proses pembentukan kapasitas dan kesadaran perilaku yang menekan pada partisipasi perempuan yang lebih besar sehingga memiliki sentralisasi peran dan pengawasan dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang transformasional sehingga dengan begitu perempuan dapat menghasilkan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Pemberdayaan perempuan berfokus untuk mewujudkan kesetaraan akses serta peranan laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi terhadap pembangunan, sehingga perempuan juga memiliki peran yang sama. strategi pemberdayaan perempuan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah adalah sebua usahaa untuk mewujudkan terdistribusinya dan terciptanya, akses peranan dan manfaat pembangunan terhadap peranan perempuan secara berimbang sehingga perempuan perlu diberdayakan karena perempuan mempunyai

kepentingan yang sama dalam pembangunan sebagai pengguna dan penggerak dari hasil pembangunan yang memiliki hak yang sama dengan laki-laki, pemberdayaan perempuan melibatkan mereka didalam kegiatan pembangunan sehingga dapat memberikan dampak yang baik dan semangat yang positif kepada semua generasi penerus.

Setyasih, (1998) ada beberapa potensi dalam pemberdayaan perempuan:

- 1) Maraknya organisasi perempuan dan forum-forum yang berspektif perempuan dimana anggota di dominasi kaum perempuan merupakan salah satu hal yang menggambarkan bahwa potensi perempuan sangat besar. Forum ini mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan menjadi satu wadah bagi perempuan, untuk mengembangkan diri dan mengembangkan pemahaman akan pentingnya peranan perempuan disegala aspek kehidupan.
- 2) Aktivitas sosial yang bsering dilakukan oleh kalangan perempuan, memberikan peluang yang sangat besar bagi perempuan agar lebih meningkatkan kesadaran berpolitik melalui peningkatan partisipasi disemua bidang pemerintahan sehingga menjadi representasi sekaligus peluang mengembangkan wacana politik yang berperspektif keperempuanan.

3. Tahap Pemberdayaan

Sumondiningrat (2004) menyatakan bahwa pemberdayaan tidak selamanya berorientasi pada peran, akses dan kotrol erhadap semua dimensi pembangunan melainkan di ajak untuk lebih mandiri agar dapat memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan dilakukan melalui proses belajar sampai mencapai status mandiri.

Adapun tahap tersebut meliputi:

- a) Tahapan penyadaran adalah upaya pembentukan perilaku peduli dan sadar sehingga ada perasaan dan keinginan yang merasa membutuhkan peningkatan kemampuan kapasitas diri.
- b) Tahapan transformasi kemampuan kerja terbukanya wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan agar membuka cakrawala dengan memberikan keterampilan dasar agar dapat mengambil peran didalam pembangunan.
- c) Tahap peningkatan kemampuan, keterampilan, intelektual, dan kecakapan sehingga terbentuk untuk lebih inisiatif dan kemampuan yang inofatif untuk untuk lebih mandiri.

Suharto (2009) mengajukan tiga dimensi dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut yang merujuk pada:

- a. Proses pembentukan dan pembangunan yang dimulai dari proses perkembangan dan pertumbuhan oleh individu seterusnya berkemang menjadi suatu perubahan sosial yang cepat lebih besar.
- b. Keadaan psikologis individu yang ditandai dengan rasa percaya diri, berguna serta mampu mengendalikan diri dan orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dan dilakukan dari sebuh sikap serta pemahaman-pemahaman terhadap gerakan-gerakan sosial, dimulai dengan proses pendidikan

dasar dan politisasi orang-orang yang lemah hanya untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang yang menekan.

Elson, (1991) Pemberdayaan (*Empowerment*) menekankan tentang adanya suatu sikap mental, tangguh sebagaimana di dalam proses pemberdayaan memiliki dua kecenderungan:

1. Kecenderungan primer, pemberdayaan dengan pendekatan proses mengalihkan sebagian wewenang, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar menjadi lebih berdaya hal ini digunakan sebagai upaya membangun dan mengembangkan aset material untuk mendukung kemampuan mereka melalui organisasi.
2. Kecenderungan sekunder, pendekatan yang digunakan untuk memotivasi dan mendorong individu supaya memiliki keberdayaan/kemampuan sehingga mereka mampu menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dari dua kecenderungan di atas merupakan upaya mempengaruhi agar kecenderungan primer dapat terwujud maka harusnya lebih sering menggunakan kecenderungan sekunder.

4. Tujuan Pemberdayaan

Fokus dan tujuan pemberdayaan secara oprasional adalah terpenuhinya peran perempuan di dalam proses pembangunan baik jangka pang ataupun jangka pendek sehingga perlu diketahui bahwa indikator keberhasilan pemberdayaan dilihat dari apakah mereka berdaya atau tidak. Sehingga apabila suatu program tentang pemberdayaan sosial digunakan, maka segala upaya harus dikonsentrasikan pada

aspek dan sasaran terhadap perubahan misalnya: kurang mampu yang perlu di optimalkan keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari keberdayaan yang mengarah pada kemampuan keterampilan dan skill yang dimiliki.

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kapasitas dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan sehingga dapat menghasilkan suatu nilai tambah keterampilan dan peningkatan kualitas diri. Dengan demikian pemberdayaan perempuan di manifestasikan untuk meningkatkan status fungsi, dan peran bagi individu, kelompok, keluarga dan masyarakat terhadap sumber daya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan. Demikian, untuk mencapai semua itu maka ada proses pemberdayaan yang dilakukan untuk memotivasi dalam bentuk pelatihan, pendidikan dan keterampilan sebagai modal pengembangan sumber daya.

Tikson (2000), Pembangunan merupakan alternatif yang dapat dilakukan diantaranya adalah peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup perempuan kemudian sasaran utamanya adalah kaum perempuan dibina dan diberdayakan agar kaum perempuan memiliki akses kontrol sehingga bisa berkontribusi terhadap pembangunan dan punya peran yang sama seperti kaum laki-laki. Berdasarkan tersebut pemikiran uraian pemikiran di atas, maka dalam aktivitas pemberdayaan ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu:

1. Pengetahuan dasar dan keterampilan intelektual (kemampuan yang menganalisis sebab akibat terhadap setiap permasalahan yang muncul).

2. Mendapat akses menuju sumber daya yang bersifat materi atau non materi guna untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka.
3. Organisasi serta manajemen menjadi salah satu wadah pengelolaan dan pengembangan keterampilan untuk kegiatan kolektif pengembangan mereka.

C. Indikasi Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Wignyosoebroto dalam gender dan transformasi sosial (1997) pengertian kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berposisi kuat (atau yang tengah merasa kuat) terhadap seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lebih lemah (atau yang tengah dipandang berada dalam keadaan lebih lemah), berdasarkan kekuatan fisiknya yang superior, dengan kesenjangan untuk dapat ditimbulkannya rasa derita di pihak yang tengah menjadi objek kekerasan itu. Namun, tak jarang pula tindak kekerasan ini terjadi sebagai bagian dari tindakan manusia untuk tak lain daripada melampiaskan rasa amarah yang sudah tak tertahan lagi olehnya.

a. Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan

Menurut Suryakusuma (1995) efek psikologis penganiayaan bagi banyak perempuan lebih parah dibanding efek fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Namun, tidak jarang akibat tindak kekerasan terhadap istri juga mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu secara biologis yang pada akhirnya mengakibatkan terganggunya secara sosiologis. Istri yang teraniaya sering

mengisolasi diri dan menarik diri karena berusaha menyembunyikan bukti penganiayaan mereka.

Aspek kekerasan perempuan yaitu;

1. Aspek Budaya

Kuatnya pengertian yang bersumber pada nilai-nilai budaya yang memisahkan peran dan sifat gender laki-laki dan perempuan secara tajam dan tidak setara. Sosialisasi pengertian tersebut melalui a.l. keluarga, lembaga pendidikan, agama, dan media massa, menyebabkan berlakunya keyakinan dan tuntutan.

2. Aspek Ekonomi

Ketergantungan perempuan secara ekonomi pada laki-laki; perempuan lebih sulit untuk mendapatkan kredit, kesempatan kerja di lingkup formal dan informal, dan kesempatan mendapat-kan pendidikan dan pelatihan.

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang dan atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap Perempuan memang tidak menyatakan secara eksplisit tentang adanya jaminan hak asasi terhadap kelompok perempuan secara khusus, namun dalam Pasal 3 memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi, termasuk tidak melakukan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Dengan demikian, bila dikaitkan dengan kewajiban negara untuk memberikan jaminan atas warga

negaranya, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia kelompok perempuan sama seperti jaminan kepada kelompok lainnya. Karena perempuan sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang juga harus dilindungi hak asasinya, maka pelanggaran terhadap hak asasi perempuan harus juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM secara umum.

Dampak kekerasan terhadap perempuan adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Kekerasan terhadap istri, apapun bentuknya akan mengakibatkan korban mengalami dampak jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek, berakibat pada fisik korban seperti luka-luka , memar pada bagian tubuh tertentu, infeksi, dan kerusakan organ reproduksi.

b. Dampak kekerasan terhadap perempuan

1. Dampak fisik dan seksual.

tindakan kekerasan bisa berupa seranagn ke tubuh korban termasuk alat kelamin, akibatnya adalah memar ringan, luka parah, disfungsi bagian tubuh dan bahkan membawa kematian. Benturan berakibat memar luar /dalam, patah tulang maupun cacat fisik secara permanen.

2. Dampak ekonomi.

Biaya yang dikeluarkan oleh korban kekerasan rumah tangga lebih besar dari biaya kesehatan lainnya, karena selain biaya pengobatan secara medis akibat dampak fisik yang dialami, korban juga harus mengeluarkan biaya yang relatif besar untuk memulihkan kesehatan mentalnya dari gangguan-gangguan

psikologis yang muncul. Di samping itu korban juga mengalami kerugian kehilangan pekerjaannya karena kekerasan yang dialami.

Dampak terhadap ekonomi keluarga. Dampak lain dari tindakan kekerasan meskipun tidak selalu adalah persoalan ekonomi, menimpa tidak saja perempuan yang tidak bekerja tetapi juga perempuan yang mencari nafkah. Seperti terputusnya akses ekonomi secara mendadak, kehilangan kendali ekonomi rumah tangga, biaya tak terduga untuk hunian, kepindahan, pengobatan dan terapi serta ongkos perkara.

3. Dampak psikologis.

berupa trauma yang dialami sebagian besar korban. Bentuk trauma berbeda antara satu korban dengan korban lainnya. Trauma ini tergantung dari usia korban serta bentuk kekerasan yang dialami korban. Trauma dapat berupa ketakutan bertemu dengan orang lain, mimpi buruk atau ketakutan saat sendiri.

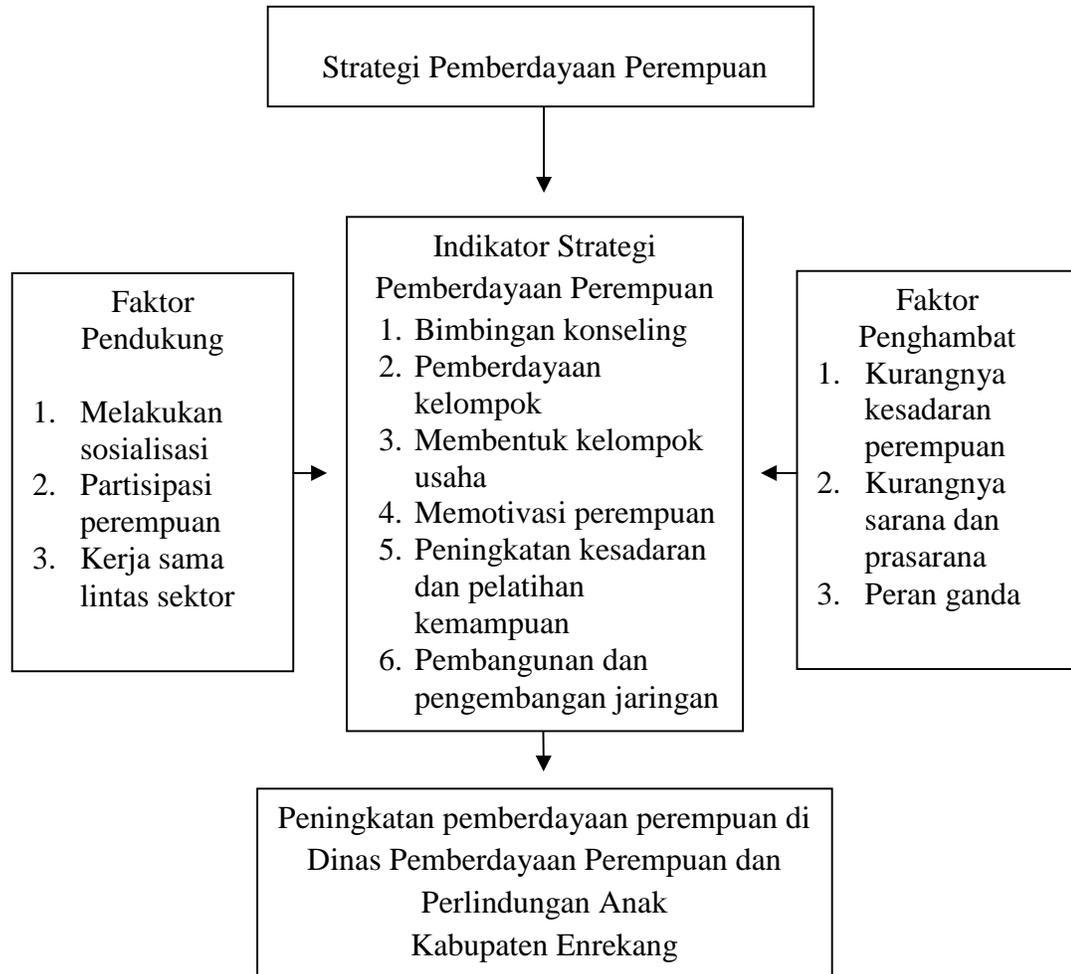
E. Kerangka Pikir

Strategi Pemberdayaan perempuan diarahkan untuk membangun partisipasi perempuan dalam mendukung terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi kaum perempuan di dalam masyarakat yang diwujudkan dalam beberapa program pemerintah. Sebagai suatu pendekatan yang cukup strategis dalam mewujudkan tercapainya pemberdayaan perempuan ada tujuh indikator pendekatannya yaitu; strategi bimbingan konseling dengan pendekatan melatih individu, Pemberdayaan kelompok yang berorientasi pada meningkatkan kesadaran dan pengetahuan keterampilan, membentuk kelompok usaha bertujuan untuk meminimalkan

persaingan dan memperkuat modal usaha dalam kelompok, memotivasi perempuan bertujuan untuk memahami nilai kebersamaan dan interaksi sosial, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan sejak dasar, pembangunan dan pengembangan jaringan yang orientasinya untuk peningkatan kemampuan anggota dan memperluas jaringan sosial disekitarnya.

Kurangnya kesadaran perempuan terhadap permasalahan-permasalahan yang sering terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual terhadap perempuan menjadi pokok masalah yang marak terjadi di dalam suatu masyarakat sehingga konsep strategi pemberdayaan perempuan menjadi adalah indikator keberhasilan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan dan pelecehan yang menimpa kaum perempuan agar peran, dan status perempuan dalam pembangunan merata. Untuk mengetahui strategi pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang dapat dilihat dengan mengidentifikasi terlebih dahulu setiap permasalahan dalam strategi pemberdayaan perempuan yang dalam pelaksanaannya sebagai berikut:

Bagan Kerangka Pikir



F. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir penjelasan untuk memahami kerangka pikir itu sendiri. Adapun dalam penelitian ini yaitu Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang. Dimana fokus penelitian adalah (1) Bimbingan konseling (2) Pemberdayaan kelompok (3) Membentuk kelompok usaha (4) Memotivasi

perempuan (5) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan (6) Pembangunan dan pengembangan jaringan.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Bimbingan konseling

Bimbingan konseling adalah; a) interaksi secara langsung b) membantu memecahkan masalah c) memberikan saran dan solusi sesuai dengan masalah yang dihadapi.

2. Pemberdayaan kelompok

Pemberdayaan kelompok yaitu; a) membangun partisipasi b) membentuk kemandirian kelompok melalui kegiatan bersama.

3. Membentuk kelompok usaha

Membentuk kelompok usaha yakni; a) kegiatan yang dilakukan secara berkelompok b) dibina dan diarahkan c) meningkatkan taraf kesejahteraan sosial/kelompok.

4. Memotivasi perempuan

Memotivasi perempuan terdiri dari; a) memberikan pemahaman b) memberikan kesadaran secara baik c) membuka cakrawala berpikir c) meningkatkan kapabilitas perempuan yang relatif masih rendah.

5. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan

Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan terdiri dari; a) proses dalam menggerakkan individu atau kelompok b) meningkatkan inisiatif c) kreativitas sebagai bentuk mengembangkan skill

6. Pembangunan dan pengembangan jaringan

Yakni: a) meningkatkan kemampuan para anggota kelompok b) mempertahankan dan memperluas jaringan sosial disekitarnya.

BAB III

LOKASI DAN METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu

Waktu Penelitian dilaksanakan setelah mengikuti seminar proposal kurang lebih 2 bulan pada tanggal 09 April sampai 15 Juni 2018.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang Jl. Buntu Juppandang No.60 Kabupaten Enrekang. terpilihnya lokasi tersebut karena meningkatnya kasus kekerasan perempuan di Kabupaten Enrekang.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2007) adalah sebuah penelitian yang dimaksudkan untuk melihat tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, perilaku, tindakan, motivasi dll. Menurut Sugiyono (2003) penelitian adalah suatu yang digunakan oleh dengan cara tingkat kejelasan yang di golongan sebagai berikut:

a) Penelitian Deskriptif

Penelitian yang di lakukan berdasarkan pada nilai suatu variabel mandiri dengan melihat satu variable yang digunakan atau lebih (independen) dengan cara membandingkan atau menghubungkannya dengan variable yang lain.

b) Penelitian Komparatif

Penelitian ini dimaksudkan untuk membandingkan suatu variable yang masih sama dengan variabel yang mandiri tetapi membandingkan variabel yang lebih dari satu, dalam waktu yang berbeda.

c) Penelitian Asosiatif

Penelitian ini difungsikan untuk melihat sejauh bagaimana hubungan ataupun juga membandingkan dengan dua atau lebih variabel sehingga penelitian ini memiliki tingkatan tertinggi di bandingkan dengan deskriptif ataupun komparatif sehingga melalui metode penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat difungsikan untuk menjelaskan, mengontrol dan meramalkan suatu gejala tertentu dan mengidentifikasi yang terdapat dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu yang bersifat khusus dan alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jika dikaitkan dengan Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang, maka metode penelitian yang paling tepat digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada suatu wilayah yang lebih luas karena dapat merumuskan dan mengumpulkan semua yang berkaitan dengan apa yang dicari berada pada wilayah dan kegiatan yang berkaitan dengan Strategi Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Enrekang. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode ini karena dianggap sangat relevan untuk digunakan.

2. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan Tipe penelitian fenomenologi, peneliti menggunakan tipe ini karena tipe penelitian fenomenologi dapat memberi gambaran secara jelas mengenai Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang. Penelitian ini akan digambarkan dan di jelaskan dengan jelas masalah-masalah dalam proses strategi pemberdayaan perempuan, dalam penelitian ini peneliti menghubungkan masalah yang terjadi di lapangan dan masalah yang dialami oleh informan tentang Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.

C. Sumber Data

Data adalah sumber data yang didapatkan melalui metode pengumpulan data yang akan dirampung kemudian dianalisis sesuai dengan metode yang digunakan sehingga menghasilkan suatu hal yang menggambarkan dengan jelas tentang sesuatu yang diteliti. Berdasarkan sifatnya data ini menggunakan data kualitatif .data kualitatif dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata dalam bentuk tulisan yang dicermati oleh peneliti sehingga penelitian ini akan dikatakan valid apabila jelas sumber datanya.

1. Data Primer

Data yang dimaksudkan adalah data yang di dapatkan langsung dari hasil Wawancara oleh beberapa informan atau narasumber yang dianggap bisa memberikan informasi yang jelas dan relevan dengan data yang sebenarnya dii lapangan mengenai strategi pemberdayaan perempuan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari data sebelumnya yang digunakan instansi atau sesuatu lembaga tertentu yang digunakan untuk suatu kepentingan lembaganya dan juga untuk kepentingan pihak lain yang membutuhkan. Hal tersebut tujuannya untuk mendapatkan landasan baru dan juga bahan untuk dimasukkan didalam kerangka pemikiran yang digunakan untuk merumuskan hasil penelitian.

D. Informan Penelitian

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam menentukan informannya. *Purposive sampling* merupakan penentuan informan tidak berdasarkan atas trata, kedudukan, pedoman, atau wilayah tetapi didasarkan pada adanya tujuan dan pertimbangan tertentu yang tetap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Pedoman pada fokus penelitian sehingga peneliti membatasi bidang-bidang temuan dengan arahan fokus penelitian fokus penelitian ini sangat penting untuk dijadikan saran dan mengarahkan jalannya penelitian. Jumlah rincian inorman sebagai berikut.

1.3 Tabel Informan Wawancara Penelitian

No	Nama Informan	Umur	Inisial	Jabatan
1.	Sawaliah Baharuddin	51	SWB	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Tasmiaty	49	TST	Kepala Seksi Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
3.	Nurhaedar	53	NRH	Ketua Kelompk Tani Putri, (KWP)
4.	Hettu'	43	HTU	Ketua Kelompok Wanita Wirausaha Kopi
5.	Junahati	27	JNH	Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
6.	Nurlina	25	NRL	Masyarakat
7.	Suriani	41	SRN	Masyarakat
8.	Hana	54	HNA	Masyarakat
9.	Hayati	46	HYT	Masyarakat
10.	Riani	27	RNI	Masyarakat

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini difokuskan untuk memperoleh data informasi serta keterangan-keterangan yang dibutuhkan penulis, pada teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian dan pencatatan tentang keadaan atau fenomena yang diselidiki atau di jumpai secara sistematis. Pengumpulan data

dilakukan dengan pengamatan secara langsung di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.

2. Wawancara

Melakukan proses tanya jawab dengan para informan seperti Kepala Seksi Pelayanan dan Perlindungan Hak Perempuan, Ketua kelompok tani, Kelompok wirausaha, Tim TP-PKK dan Masyarakat untuk memperoleh data mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah pada pembahasan Skripsi dan metode yang digunakan dalam melakukan wawancara adalah metode pertanyaan yang disusun berdasarkan kebutuhan peneliti sesuai dengan masalah yang diteliti.

3. Studi Perpustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang digunakan dengan cara membaca bahan-bahan lainnya yang erat hubungannya dengan skripsi ini.

4. Dokumentasi

Dokumen yaitu mengkaji dokumen-dokumen baik berupa buku-buku referensi ataupun yang berkaitan dengan pasal-pasal yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan penulis, kemudian melakukan penelusuran dokumen sehingga mendapatkan data dan literatur yang digunakan dalam menganalisis permasalahan, yaitu yang berhubungan dengan teori-teori, Undang-undang dan dokumen tentang proses strategi pemberdayaan perempuan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan berdasarkan identifikasi jawaban dari informan, baik yang bersumber dari observasi, wawancara, dokumentasi, untuk

menemukan aspek-aspek yang dominan mempengaruhi tahapan-tahapan Strategi Pemberdayaan Perempuan. Hasil identifikasi tersebut akan ditarik kesimpulan secara kualitatif tentang realitas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.

Kesimpulan secara kualitatif tentang realitas Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang dalam melakukan analisis data penelitian mengacu kepada beberapa tahapan yang di jelaskan haris herdiansyah (2010) yang terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara dengan informan peneliti kemudian melakukan observasi langsung ke lokasi untuk menunjang dan medapatkan hal-hal yang dibutuhkan untuk dimasukkan di dalam proses penelitian mengenai strategi pemberdayaan perempuan sehingga mudah mendapatkan data yang valid.
2. Reduksi data yaitu Proses pemilihan, pemusatan perhatian kapada penyederhanaan data-data mentah yang muncul dari catatan yang didapatkan dilapangan selama meneliti tujuan diadakan transkrip data (transformasi data) untuk mendapatkan informasi yang ada kaitannya dengan masalah atau tidak sesuai dengan masalah yang menjadi tujuan penelitian dilapangan.
3. Penyajian data, yaitu sekumpulan data dan informasi dalam bentuk graik, tabel, graik bagan dan jaringan yang digunakan untuk menganalisis dan

mempertajam lebih dalam pemahaman penelitian terhadap informasi yang diambil dan disajikan dalam bentuk tabel atau uraian penjelasan.

4. Tahap akhir adalah proses penarikan dan kesimpulan atau verifikasi dengan pola konfigurasi, penjelasan mengenai alur sebab dan akibat atau proposisi. Penarikan sebuah kesimpulan yang dilakukan dengan cermat dan verifikasi ulang pada catatan-catatan dan data-data yang sesuai dilapangan sehingga data-data yang didapatkan dapat diuji validitasnya.

G. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan agar peneliti dapat memperkuat data penelitian. Dimana penelitian yang salah akan menghasilkan penilaian yang salah begitu juga dengan penelitian yang benar maka akan menghasilkan kesimpulan yang sesuai. Penulis atau peneliti memantau perkembangan yang ada di lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung tentang apa yang dilakukan oleh Dinas Pemerdayaa Perempuan, sehingga data yang dikumpulkan oleh peneliti memiliki keabsahan data yang akurat dan untuk memperoleh keabsahan data tersebut dalam penelitian ini.

Teknik pemeriksaan data yang didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Menurut Bachri (2010) ada 4, teknik yaitu :

1) Derajat kepercayaan

Pada metode ini yang dimaksudkan adalah metode validitas dari non kualitatif.

Fungsinya untuk mengetahui kevalidtan data yang digunakan sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat

kepercayaan hasil dari penemuan tersebut dapat kebenrannya sesuai dengan apa yang ada dilapangan..

2) Kebergantungan

Merupakan istilah realibilitas dalam penelitian kualitatif, ialah apabila proses validitas diulangi beberapa kali dan pada kondisi yang sama hasilnya secara esensial tetap sama. Sedangkan pada penelitian kualitatif untuk mencari hasil yang benar-benar sama sangat sulit dikarenakan beberapa faktor yaitu manusia yang digunakan sebagai instrumen, kondisi kelelahan dan faktor kejauhan juga sangat berpengaruh.

3) Kepastian

Pada metode penelitian kualitatif suatu kepastia dan objektivitas harusnya menekan pada suatau data bukan dengan orang atau beberapa orang.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi atau Karakteristik Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang terletak di Jl. Buttu Juppandang No.60 Kecamatan Enrekang tepatnya di Ibu Kota Kabupaten Enrekang. Sejarah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang terbentuk sejak 9 Maret 1996 yang disebut dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana kemudian memisahkan diri menjadi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sejak 1 Januari 2017.

2. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang mengarahkan kemana organisasi akan dibawa dan bagaimana mencapai tujuan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan melalui penetapan kebijakan, program kerja, dan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Enrekang adalah *“Terwujudnya Kesejahteraan Perempuan dan Anak menuju Enrekang Maju, Aman dan Sejahtera”*

Visi tersebut ditopang dengan nilai-nilai :

- 1) Kesetaraan menuju keadilan gender mengesankan bahwa manusia baik perempuan dan laki-laki adalah sama-sama memiliki hak serta kewajiban sebagai warga negara.
- 2) Kesejahteraan adalah kondisi dimana perempuan dan anak terpenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka.

Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

Enrekang sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam berbagai bidang.
- 2) Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- 3) Meningkatkan peran serta keterlibatan perempuan baik politik maupun jabatan publik.
- 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

B. Keadaan Demografi

- 1) Jumlah Pegawai/Staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang Tahun 2018

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa jumlah Pegawai/Staf dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang berjumlah 38 orang, yang terdiri dari; pejabat struktural sebanyak 15 orang, staf 7 orang dan tenaga sukarela sebanyak 16 orang.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Enrekang merupakan kawasan badan kepegawaian yang terletak di Jalan Buttu Juppandang No. 60 yang bersebelahan dengan kantor Lembaga Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan di antaranya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan PT. Marmer yang berada dikawasan Kecamatan Enrekang.

2) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Enrekang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a) Sub Bagian Perencanaan
 - b) Sub Bagian Keuangan
 - c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengarusutamaan Gender (BPG)
 - a) Seksi Kesetaraan Gender
 - b) Seksi Ketahanan dan Kualitas Keluarga
4. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan
 - a) Seksi Pelayanan dan Perlindungan Hak Perempuan
 - b) Seksi Pengembangan Layanan Perlindungan Perempuan
5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
 - a) Seksi Pemenuhan Hak Anak
 - b) Seksi Perlindungan Khusus Anak

6. Bidang Data dan Informasi
 - a) Seksi Pengolahan dan Analisis Data dan Informasi
 - b) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang

1. Kepala Dinas

- a) Tugas Pokok

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukannya di bawah dengan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan urusan pemerintahan termasuk di dalam bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

- b) Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2. Mendukung setiap proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Pembinaan serta pelaksanaan kebijakan tugas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta kesekretariatan dinas.
4. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diamanahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

a) Tugas Pokok

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang bertanggung jawab kepada kepala Dinas dan melakukan tugasnya membantu kepala dinas menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka menyelenggarakan dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan sub bagian kepegawaian dan umum, keuangan dan perencanaan, memberikan pelayanan administrasi serta fungsional kepada semua unsur dalam lingkup dinas pemberdayaan pemberdayaan dan perlindungan anak.

b) Fungsi

1. Perumusan teknis dan kebijakan di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
2. Pemberian dukungan terhadap setiap penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
3. Pelaksanaan tugas dan pembinaan di setiap bidang perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan.
4. Melaksanakan tugas lain wewenang dari Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG)

a) Tugas Pokok

Bidang pengarusutamaan gender dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas yang mempunyai fungsi dan

tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis bidang Pengarusutamaan Gender.

b) Fungsi

1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengarusutamaan Gender.
 2. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengarusutamaan Gender.
 3. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengarusutamaan Gender.
 4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi bidang Pengarusutamaan Gender.
 5. Pelaksanaan pendokumentasian bidang Pengarusutamaan Gender.
 6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
4. Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

a) Tugas Pokok

Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan memiliki tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

b) Fungsi

1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
2. Perumusan kebijakan teknis Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan Perlindungan dan

Pemberdayaan Perempuan.

5. Pelaksanaan pendokumentasian bidang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pemberdayaan perempuan.

5. Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

a) Tugas Pokok

Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan melakukan tugas pokoknya membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.

b) Fungsi

1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Pemenuhan hak dan perlindungan anak
2. Perumusan kebijakan teknis pemenuhan hak dan perlindungan anak.
3. Melaksanakan program dan kegiatan dalam bidang pemenuhan hak dan perlindungan anak.
4. Pelaksanaan pembinaan dan mengkoordinasikan setiap pelaksanaan pemenuhan hak dan perlindungan anak.
5. Pelaksanaan pendokumentasian bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak.
6. Pengendalian dan mengevaluasi setiap pelaksanaan pemenuhan hak dan

perlindungan anak.

6. Bidang Data dan Informasi

a) Tugas Pokok

Bidang Data dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab terhadap kepala Dinas yang memiliki fungsi dan tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan teknis bidang data dan Informasi.

b) Fungsi

1. Penyusunan program dan kegiatan Bidang Data dan Informasi.
2. Perumusan kebijakan teknis bidang Data dan Informasi.
3. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Data dan Informasi.
4. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi Data dan Informasi.
5. Pelaksanaan pendokumentasian bidang Data dan Informasi.
6. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Data dan Informasi.

4) Karakteristik Informan

1. Keadaan Informan Menurut Tingkat Umur

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa keadaan informan menurut Tingkat Umur menunjukkan umur 51-54 tahun sebanyak 3 orang, umur antara 41-49 sebanyak 4 orang dan umur 25-27 tahun sebanyak 3 orang sedangkan total informan 10 orang.

2. Keadaan Informan Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian

menunjukkan tingkatan S2 1 orang tingka S1 sebanyak 2, orang, tingkatan SMA sebanyak 3 orang, tingkatan SMP sebanyak 3 orang, tingkatan SD 1 orang, dengan total informan 10 orang.

3. Keadaan Informan Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di lokasi penelitian menunjukkan bahwa keadaan informan menurut jenis kelamin menunjukkan jumlah perempuan sebanyak 10 orang dengan total informan 10 orang.

C. Masalah Yang Menimpa Kaum Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan” dalam Undang-undang Nomor UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Seringkali kekerasan pada perempuan terjadi karena adanya relasi atau hubungan yang tidak seimbang antara perempaun dan laki- laki hal ini disebut ketimpangan atau ketidakadilan jender. Ketimpangan jender adalah perbedaan peran

dan hak perempuan dan laki-laki di masyarakat yang menempatkan perempuan dalam status lebih rendah dari laki-laki. “Hak istimewa” yang dimiliki laki-laki ini seolah-olah menjadikan perempuan sebagai “barang” milik laki-laki yang berhak untuk diperlakukan semena-mena, termasuk dengan cara kekerasan

Upaya untuk menyingkirkan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Enrekang adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Enrekang sebagaimana dilihat Pada tahun sebelumnya 2010-2013 jumlah kekerasan terhadap perempuan yang terjadi jauh dibandingkan pada tahun 2014-2017 tingkat kekerasan jauh lebih tinggi kasus kekerasan yang menimpa banyak kaum perempuan, dilansir dari data Laporan Bentuk Kekerasan (DP3A) Kabupaten Enrekang Seperti pada bagan berikut yang menunjukkan jumlah kekerasan perempuan terus meningkat dilihat dari bentuk kekerasan.

Tabel Tingkat Kekerasan Perempuan Tahun 2014-2017

Tahun	Penganiayaan	Pelecehan seksual	Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
2014	8	15 orang	10 orang
2015	4 orang	13 orang	5 orang
2016	13 orang	11 orang	5 orang
2017	14 orang	23 orang	7 orang
Jumlah	49 orang	62 orang	27 orang

Sumber: DP3A Kabupaten Enrekang

Sesuai dengan tabel diatas yang menjadi salah satu permasalahan yang menimpa kaum perempuan terlihat pada tabel di atas dimana kekerasan perempuan terus mengalami peningkatan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang telah ditetapkan melalui peraturan daerah nomor 7 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang dirangkum sebagai berikut;

1. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup perempuan di semua sektor kehidupan yang terkait dengan agama, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan Perlindungan dan kesejahteraan Perempuan dan Anak.
3. Mewujudkan Peningkatan dan penguatan untuk kemandirian organisasi perempuan dan anak.

Adapun tujuannya yaitu;

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan sebagai insan pembangunan
2. Meningkatkan perlindungan kesejahteraan perempuan dan anak dalam rumah tangga / keluarga serta masyarakat
3. Menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Meningkatkan sinkronisasi dan koordinasi program Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan Organisasi Perempuan di masyarakat

Dari uraian di atas Berikut hasil wawancara peneliti dengan narasumber staf yang menangani Pemberdayaan Perempuan SWB, bahwa;

“yang menjadi masalah terhadap perempuan sekarang khususnya di Kabupaten Enrekang ini karena setiap tahun selalu terjadi kasus kekerasan terutama yang menimpa bagi perempuannya dan itu banyak yang terjadi pada masyarakat menengah kebawah yang termasuk dalam kategori (miskin) kita selalu mengupayakan bagaimana perempuan di Enrekang sadar dan bisa lebih menjaga dirinya.
(SWB, 51 Tahun, Kepala DP3A, 12 April 2018).

Dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering terjadi kepada masyarakat (perempuan) menengah kebawah (miskin) banyaknya jumlah kasus kekerasan menimpa perempuan menjadi tugas besar Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk memberdayakan perempuan sehingga dapat menghilangkan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana pelaksana adalah penentu keberhasilan untuk membawa perempuan keluar dari kekerasan yang banyak menimpa kaum perempuan sehingga kedepannya perempuan mendapatkan perlakuan yang baik, adil dan tanpa tekanan di masyarakat. dalam upaya pengendalian jumlah kasus yang banyak menimpa kaum perempuan melalui pelaksanaan program kerja oleh dinas

pemberdayaan perempuan maka perlu adanya proses penyelenggaraan yang sistematis yang menjadi kegiatan prioritas dilapangan guna menunjang keberhasilan pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan secara menyeluruh.

Sebagaimana yang disampaikan oleh informan Tp-Pkk;

“Keadaan seperti ini (kekerasan perempuan) sudah sering sekalimi terjadi dek yang bisa kita lakukan sebagai orang tua dan juga masyarakat harus turut mengawasi terutama ini bagaimna cara kita mengawasi anak-anak kita karena kalau sudah kejadiannya seperti ini tentu orang tuanya juga yang disalahkan jadi harus ada pengawasan yang baik kepada anak-anak terutama bagi perempuannya yang rentan sekali”
(JNH, 27 Tahun, Tp-Pkk, 13 Mei 2018).

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa maraknya terjadi kasus kekerasan dan banyak menimpa kaum perempuan menjadi tugas semua kalangan masyarakat untuk turut serta melakukan kerja sama yang Baik kepada semua pihak untuk memberi pengarahan yang positif kepada semua masyarakat bai laki-laki dan perempuan sehingga kasus-kasus yang sering menimpa kaum perempuan dapat di hilangkan.

1. Bimbingan Konseling

Gibson and Michell, (2010) Konseling merupakan profesi penolong adalah suatu konsep yang melandasi fungsi serta peran konselor di masyarakat. Profesi penolong adalah profesi yang setiap anggotanya dilatih khusus sehingga memiliki lisensi skill, dan pemahamanterhadap sesuatu sesuatu.

Proses perencanaan strategi agar tercapainya tujuan dengan baik maka harus ada bimbingan konseling tujuannya untuk menyadarkan perempuan agar dapat memahami kemampuan dan potensi dirinya. Berikut pernyataan informan TST;

“Eeee .. Sudah banyak sekali dek sebenarnya yang curhat tentang masalahnya ke saya dek biasa mereka ke kantor biasa juga ke rumah dan kadang juga melalui via telepon saya senang mereka punya keberanian untuk ceritakan masalah mereka di situ peran kami untuk merangkul, memeberikan saran dan solusi ada yang datang sampai 5 sampai 7 kali dengan kasus yang sama dan yang paling banyak kasus yang kami tangani yah kasus KDRT karena ini memang masalah yang cukup rumit sebenarnya”

(TST, Kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan perempuan, 20 April 2018).

Dari apa yang disampaikan oleh informan TST di atas bahwa ada beberapa perempuan yang selama ini mengalami banyak masalah baik dalam lingkungan keluarga dan kelompok atau hubungan emosionalnya dengan kelompoknya mereka sering menceritakan keluhannya dan meminta saran kepada seksi perlindungan dan pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, hal ini menjadi salah satu fungsi bagian seksi perlindungan Perempuan untuk memberikan masukan berupa sumbangan pemikiran baik dalam bentuk solusi atau saran. Dari uraian yang disampaikan oleh informan di atas berikut pemaparan narasumber kepala Dinas DP3A;

“Bimbingan koseling penting sekali dek kalau saya biasa langsung datangi saja rumahnya untuk memberikan pemahaman dan biasa juga kami berdyakan dengan ikutkan mereka bergabung dalam kegiatan yang kami lakukan. Kemudian membimbing mereka supaya kedepannya dapat mengatasi permasalahan yang terjadi baik dalam lingkup rumah tangga (keluarga) maupun dimasyarakat”

(SWB, 51 Tahun, Kepala DP3A, 12 April 2018).

Terlihat dari apa yang disampaikan oleh SWB bahwa peran Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Enrekang sangat besar sebagai wadah menampung masalah yang dihadapi oleh perempuan untuk memberikan perhatian khusus kepada perempuan yang kurang aktif, atau yang banyak mengalami masalah dalam rumah

tangganya kemudian membantu dan memberikan solusi terlepas dari pada itu perempuan dapat memahami apa yang ada pada diri mereka dan dapat bekerja sama dengan baik dalam lingkup kelompoknya maupun di masyarakat. selanjutnya pernyataan informan yaitu salah satu masyarakat;

“bimbingan konseling ? .. dulu adaji begitu dek bimbingan konseling tapi kalau disini sering kami sebut penyuluhan semacam itumi, biasanya di datangkan langsungjiaa dari Kabupaten, tapi itu dulu keliling ke desa-desa ji tapi sekarang lamami tidak ada lagi kudengar begitu, tidak pernah lagi saya dengar ada penyuluhan begitu padahal bagus sekali karena na kasihki pemahaman” (SRN, 41 Tahun, Masyarakat, 17 April 2018)

Terlihat bahwa pelaksanaan dalam hal bimbingan konseling yang dilakukan di kabupaten Enrekang belum terlalu optimal karena hanya dilakukan sesekali dan kurang efektif dan efisien hal itu juga menjadi salah satu penghambat perempuan untuk lebih maju.

2. Pemberdayaan kelompok

Kelompok adalah sejumlah individu yang berkolaborasi, berkomunikasi satu sama lain melaksanakan kegiatan atau program dalam beberapa jangka waktu tertentu yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga hal tersebut memberikan kesempatan bagi semua anggota untuk berkomunikasi secara langsung. Sejalan dengan uraian di atas berikut pernyataan TST bahwa;

“pemberdayaan kelompok digunakan sebagai wadah untuk mengajak perempuan melakukan kegiatan perekonomian yang artinya perempuan dapat menghasilkan sesuatu sehingga mereka dapat membantu perekonomian keluarganya *misale to* disini sudah ada usaha dangke, kue tektekan oleh-oleh khas Enrekang dan masih banyak lagi usaha-usaha yang dilakukan oleh perempuan dan sudah terlihat sekali hasilnya karena mereka sudah dapat mencukupi kebutuhan mereka dan juga membuka lapangan kerja, nahh...

pemberdayaan kelompok seperti ini harus terus dikembangkan supaya perempuan lebih maju dan mandiri dek”
(TST, 49 Tahun, Kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan perempuan, 20 Maret 2018).

Terlihat bahwa pemberdaayaan perempuan berjalan dengan baik ketika program kerja yang ada dapat berjalan sesuai dengan tujuan. berpartisipasi mengembangkan usaha. Pemberdayaan kelompok bertujuan untuk memberdayakan perempuan dengan cara membekali perempuan dengan keterampilan, skill sehingga perempuan mempunyai peran akses dimasyarakat. Seperti yang disampaikan oleh informan bahwa sudah ada kelompok yang diberdayakan dan sudah terlihat hasilnya karena sudah dapat menghasilkan dan memenuhi kebutuhannya terlebih sudah dapat membuka lapangan pekerjaan hal ini erat kaitannya dengan strategi menimalisir terjadinya perceraian karena faktor ekonomi dan lain sebagainya

Seiring dengan apa yang disampaikan oleh TST Berikut hasil pernyataan informan Tp-Pkk;

“*Taaa pahammi kanakmi dek*, saya pribadi ditugaskan sebagai ketua tim Tp-Pkk sejauh ini berusaha keras bagaimana supaya ini perempuan bisa lebih sadar begitu supaya ada juga keahliannya ada juga bisa di andalkan makanya saya ikutkan mereka terlibat kalau ada kegiatan tapi *susanna* karena sebagian saja yang mau padahal kalau ikut kegiatan diluar bagus sekali supaya mereka juga yang di desa tidak ketinggalan biar mereka juga punya pengalaman”
(JNH, 27 Tahun, Tp-Pkk, 13 Mei 2018).

Terlihat bahwa Tp-Pkk sebagai wadah untuk membantu memberdayakan perempuan dan keluarga sudah banyak memberi sumbangsi pikiran dan tenaga untuk melibatkan dan mendorong untuk memberdayakan perempuan di Kabupaten Enrekang tujuannya adalah demi kesejahteraan keluarga dan perempuan. Sehingga

melalui kegiatan yang dilakukan dapat mempengaruhi perempuan agar dapat lebih produktif dan berdaya.

Dari ungkapan pernyataan beberapa informan diatas berikut pernyataan salah satu masyarakat;

“hmm,, susah saya jelaskan dek... karena biasanya kalau ada kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten hanya orang-orang tertentu saja yang dilibatkan walaupun kita mau ikut pasti sudah ada yang dipilih langsung dari Kecamatan jadi bagaimana beda' kami-kami ini mau berkembang seperti mereka-mereka kalau kayak ji di batasiki terlibat”
(NRL, 25 Tahun, Masyarakat, 30 April 2018).

Terlihat bahwa ada ketidak merataan keterlibatan perempuan di dalam proses yang berkaitan dengan keterlibatan mereka pada program-program kerja yang dilaksanakan hal itu kemudian menjadi penghambat bagi perempuan untuk berkembang sebagaimana yang yang dimaksudkan di atas ada ada keinginan terlibat akan tetapi sudah ada yang di tunjuk langsung dari kecamatan Sebagaimana keberhasilan suatu proses pemberdayaan perempuan apabila semua perempuan dapat terlibat dan berdaya.

3. Pemberdayaan Kelompok Usaha

Pemberdayaan kelompok merupakan kegiatan yang mempertemukan orang-orang dengan tujuan yang sama untuk mengembangkan sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya. Salah satu indikator keberhasilan sebuah kelompok ketika semua elemen dalam suatu kelompok tersebut merasakan hasilnya. Untuk meningkatkan SDM pada kelompok usaha yang harus dilakuka adalah menyiapkan fasilitas dan melakukan sosialisasi guna untuk meningkatkan minat dan kemampuan

dalam bidang usaha yang dilakukan. Muljana (1995) strategi dalam meningkatkan kegiatan program kelompok usaha.

1. Meningkatkan kemampuan organisasi dengan mendorong agar perlengkapan berfungsi sepenuhnya.
2. Membina dan mengembangkan kemampuan teknis, keterampilan manajemen.
3. manajemen dan jiwa wirausaha para anggota pengurus, karyawan dan manajer.
4. Meningkatkan dan memperluas kegiatan penenerangan dan penyuluhan baik di kalangan internal maupun di masyarakat luas.
5. Membantu pembinaan kerja sama antar sesama antar wirausaha.

Seiring dengan dengan gagasan di atas peneliti mewawancarai informan;

“Untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok usaha di Kabupaten Enrekang, yang sering kami lakukan adalah mengedukasi anggota pengusaha tentang cara pengelolaan usaha yang baik, kemudian menjalin kerja sama yang baik dengan pengusaha yang lainnya di lingkup Enrekang tujuannya untuk memperluas jangkauan produk usaha juga dek begitu,,”
(SWB, 51 Tahun, Kepala DP3A, 12 April 2018).

sesuai dari apa yang disampaikan oleh informan di atas bahwa dari program yang ada dimana dinas pemberdayaan perempuan sebagai wadah untuk memberdayakan perempuan di Kabupaten Enrekang sudah banyak melaksanakan tugasnya termasuk di dalamnya adalah memberikan pemahaman tentang cara mengelola usaha yang baik, orientasinya adalah keberhasilan usaha perempuan di Kabupaten Enrekang. Penjelasan yang lain juga disampaikan oleh informan;

“di desa serang adalah mayoritas masyarakatnya penghasil kopi, dulu ada pabrik kopi kemasan yang di bangun tapi karena alatnya tidak lengkap sampai sekarang pabriknya tidak pernah difungsikan”
(HNA, 54 Tahun, Masyarakat, 10 Mei 2018).

Terlihat bahwa sebelumnya sudah ada usaha yang digagas tetapi kenadalanya adalah pabrik yang menjadi sarana untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah dan juga menjadi salah satu strategi untuk memberdayakan kaum perempuan di desa serang tidak berjalan sesuai dengan harapan masyarakat sebagaimana tujuan dari pemberdayaan adalah memberi kesempatan perempuan agar dapat terlibat pada proses pembangunan di Kabupaten Enrekang. Dari apa yang disampaikan oleh HNA diatas Berikut menurut salah satu masyarakat;

“yahhh sebenarnya ada toji keinginan untuk membuat usaha bersama tapi yah kalau hanya satu dua orang yang mau terlibat susah juga dek terlaksana karena dana yang digunakan dari setiap individu, makanya banyak yang tidak terlalu merespon”
(HYT, 46 Tahun, Masyarakat, 27 April 2018).

Terlihat bahwa kesadaran perempuan di Kabupaten Enrekang tentang pengembangan usaha perempuan masih kurang dilihat dari tingkat partisipasi perempuan yang terbilang minim hal tersebut menjadi penghambat perempuan untuk lebih berkembang dan lebih produktif.

4. Memotivasi Perempuan

Motivasi adalah sebuah konsekuensi akibat dari sebuah hasil yang ingin dicapai atau diraih seseorang dan suatu perkiraan bahwa apa yang dilakukan mengarah pada hasil yang di inginkannya. Motivasi dapat diartikan sebagai suatu tujuan atau pendorong untuk mencapai hasil, dengan kata lain tujuan yang ingin dicapai

sebenarnya menjadi daya penggerak utama bagi seseorang dalam berupaya dalam mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya baik itu secara positif ataupun negatif. Sebagaimana menurut salah satu narasumber bahwa;

“Sebenarnya perempuan di Enrekang ini cerdas semua dan rata-rata memiliki keahlian karena didukung oleh alam disekitarnya, mereka punya kemampuan dan keahlian tinggal bagaimana kita terus berusaha memperbiki cara berpikir mereka dan membangkitkan semangat mereka, tapi begitumi dek kita taumi pasti ada yang merespon ada yang tidak merespon. Tapi kembali lagi kita usahakan supaya mereka bisa lebih mengerti”

(NRH, 53 Tahun, Ketua kelompok Tani, 14 April 2018).

Terlihat bahwa perempuan di Kabupaten Enrekang pada dasarnya memiliki keahlian karena di bentuk dan didukung oleh alam disekitarnya sehingga memaksimalkan kemampuan yang dimiliki sebagaimana untuk tercapainya tujuan pembangunan tentu pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk meningkatkan semangat individu dalam mengelola Sumber daya Alam yang dimiliki dan selalu mengasah keahlian yang dimiliki perempuan melalui program kerja, kegiatan yang melibatkan perempuan dengan begitu perempuan dapat mengekspresikan keahlian mereka melalui ruang kolaborasi/kelompok sehingga mengantarkan perempuan menjadi perempuan yang mandiri dan berkualitas.

Selain itu peneliti juga mewawancarai seorang informan:

“terkait dengan hal itu dek kami menupayakan dan selalu memotivasi perempuan kemudian bertukar pikiran agar supaya mereka punya inisiatif, karena selama ini perempuan kurang sekali minatnya untuk pengembangan dirinya”

(TST, 49 Tahun, Kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan perempuan, 20 Maret 2018).

Dari uraian pernyataan TST diatas dapat disimpulkan bahwa dengan memotivasi perempuan dan bertukar pikiran untuk memunculkan pemikiran baru dan ide baru agar ada inisiatif untuk mengembangkan kemampuan perempuan agar lebih berkualitas dan lebih mandiri. Berikut wawancara dengan Tp-pkk

“kami selaku pengurus Tp-Pkk selalu berusaha mengarahkan perempuan, memotivasi mereka tapi begitumi dek ada yang mau mendengar ada juga yang masah bodoh. Kedepannya melalui proker semoga bisa membuat perempuan lebih aktif lagi”

(JNH, 27 Tahun, Tp-Pkk, 13 Mei 2018).

Selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan JNH di atas bahwa sudah ada itikad yang dilakukan oleh Tp-Pkk untuk memotivasi perempuan namun hanya sebagian yang mau mendengar ada juga yang kurang merespon. Upaya yang kemudian dilakukan kedepannya adalah lebih sering melakukan kegiatan yang dapat mengembangkan kapasitas diri mereka untuk meningkatkan minat mereka dalam pengembangan keahlian yang dimiliki.

5. Peningkatan Kesadaran dan Pelatihan Kemampuan

Stephen R. Covey (2002) Peningkatan kesadaran adalah sebuah landasan kokoh yaitu sebuah prinsip yang terbentuk didalam diri individu sehingga dapat merubah sudut pandang terhadap sesuatu, melalui peningkatan kesadaran diharapkan mampu mendorong individu untuk berubah. Pelatihan kemampuan adalah upaya mendorong kaum perempuan untuk dapat meningkatkan skill sebagai bekal untuk berkontribusi terhadap pembangunan.

Tujuan pelatihan kemampuan sebagai pengembangan kerja diarahkan untuk membekali, meningkatkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas dan kesejahteraan.

Adapun tujuannya sebagai berikut;

1. Memperbaiki pemahaman, meningkatkan kinerja yang efektif meningkatkan program pelatihan dan pengembangan yang sehat dan berfaedah.
2. Memutakhirkan keahlian sejalan dengan teknologi melalui pelatihan, melalui pelatihan, melatih individu agar dapat mwngaplikasikan teknologi baru secara Efektif.
3. Memutakhirkan keahlian sejalan dengan kemajuan teknologi. Mengorientasikan individu terhadap organisasi dan bekerja secara benar. Seiring dengan gagasan Simamora di atas peneliti mewawancarai seorang narasumber yang terlibat langsung dalam tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga tentang pemberdayaan perempuan dalam lingkup masyarakat luas berikut ini pernyataan informan NRH bahwa;

“begini sebenarnya kalau berbicara pelatihan harusnya ada dari Kabupaten yang dikirim ke desa-desa seperti orang yang punya keahlian menjahit, atau mendaur ulang bekas sampah, atau dan semacamnya karena kendalanya disitu tidak ada yang melatih kami disini jadi kalau ada ini pelatihan tentu akan menjadi pelajaran baru juga supaya kedepan kami bisa membuat usaha yang bisa kami lakukan dirumah”

(NRH, 53 Tahun, Ketua kelompok Tani, 14 April 2018).

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa sudut pandang perempuan tentang peningkatan kesadaran dan kemampuan harus terus digali sehingga perempuan juga berdaya dan miliki kemampuan. SDM merupakan unsur utama dalam menentukan

keberhasilan karena merupakan penggerak untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan agar dapat brdaya dan behasil sehingga upaya yang harus dilakukan adalah memberikan pemahaman. Berkaitan dengan hal itu hasil berikut pemaparan salah satu masyarakat HYT;

“Dulu ada pelatihan dek sebenarnya kalau saya itu belum maksimal karena kegiatannya hanya sekitar 3 kali dalam setahun harusnya selalu dilaksanakan biar kita kelompok perempuan disini disini lebih paham. Sekarang justru tidak ada lagi pelatihatannya kan bagus kalau ada pelatihan atau penyuluhan setiap 1 pekan sekali”

(HYT, 46 Tahun, Masyarakat, 10 April 2018)

Pelatihan harus menjadi pembelajaran yang mengarahkan perempuan untuk lebih baik. Terkait dengan hal itu pemerintah daerah melalui kepala desa atau organisasi dalam lingkup desa (karang taruna, dll) menitisentralkan pada bagaimana cara memfasilitasi perempuan untuk melaksanakan kegiatannya dan menyediakan pelatihan bagi kaum perempuan agar perempunyai inovatif dan membawa perempuan kearah yang lebih baik dan lebih maju.

“kalau ada kegiatan pelatihan selalunya di kecamatan di adakan dek, tidak pernah ada yang datang ke Desa nating, bayangkan kami kan jauh dari kecamatan dan harus menempuh perjalanan 8 kilo untuk sampai kesana untung baik kalau bagus jalan ini klo musim hujan susah skali di lewati” (HNA,54 Tahun, Masyarakat, 29 April 2018).

Dikaitkan dengan uraian sebelumnya oleh informan HYT bahwa ada ketidakmerataan dan kurang tersistematis dari proses pelatihan yang melibatkan masyarakat bungin secara umum sehingga perempuan kurang terhadap pengembangan diri, sementara itu yang harus dilakukan manajemen puncak terhadap pelatihan kesadaran dan keterampilan harus disesuaikan dengan kondisi dan lokasi yang digunakan sebagai penetapan program kerja.

6. Pembangunan dan Pengembangan Jaringan

Teori dan indikator pembangunan sebagai suatu perumusan melalui kebijakan dalam banyak hal membuktikan keberhasilannya terhadap pembangunan selain itu hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara adil. Dari gagasan di atas berikut menurut kepala Dinas DP3A;

“salah satu kemajuan perempuan dan keberhasilan pemberdayaan perempuan apabila 30% perempuannya sudah berdaya dan sejahtera sehingga upaya yang terus dilakukan dinas pemberdayaan perempuan adalah bagaimana caranya supaya ada kesadaran perempuan untuk lebih memanfaatkan peluang dan potensi guna memecahkan masalah yang sering terjadi terhadap kaum perempuan misalnya, cerai karena faktor ekonomi, kekerasan yang dialami perempuan karena persoalan nafkah kemudian menelantarkan anak-anaknya dll, tujuannya sebenarnya adalah pemenuhan hak perempuan dalam proses kegiatan pembangunan di Kabupaten Enrekang”.
(SWB, 51 Tahun, Kepala DP3A, 12 April 2018).

Perempuan pada dasarnya adalah bagian dari sosial masyarakat yang memiliki hak dan peran yang sama dalam proses pembangunan sebagaimana yang disampaikan oleh SWB di atas bahwa keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari pemberdayaan perempuan dalam kaitannya dengan peran mereka dalam proses pembangunan sehingga upaya yang terus dilakukan adalah memberi pemahaman perempuan agar memanfaatkan setiap potensi yang dimiliki sehingga mendapat tempat untuk berkontribusi terhadap pembangunan seperti halnya laki-laki.

Sejalan dengan hal itu salah satu informan memberikan masukan yaitu;

“Memperluas link diluar kemudian membantu perempuan memperluas usaha mereka sebagai langkah untuk memberdayakan kaum perempuan sudah ada beberapa yang memang sudah mulai menggunakan sosial media kita jari mereka untuk memasarkan produk dan usaha mereka dan omsetnya lumayan ketimbang dipasarkan di pasaran dan ini juga salah satu langkah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas perempuan dek karena jelas sekali

kita tau kalau pemicu pertama teradinya kekerasan dalam rumah tangga tidak lepas dari beban keluarga terlebih faktor ekonomi sehingga kami dari dinas fokus pada peningkatan kapasitas perempuan”
(TST, 49 Tahun, Kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan perempuan, 20 Maret 2018).

Dari uraian yang disampaikan oleh informan di atas dapat dilihat bahwa dari dinas pemberdayaan perempuan sudah melakukan beberapa metode strategi untuk mengembangkan skill perempuan di Kabupaten Enrekang melalui pengembangan/perluasan jaringan untuk mendukung pendapatan dan sebagai solusi jitu untuk meningkatkan pembangunan melalui pendapatan daerah sehingga perempuan dibekali keterampilan mereka.

“penjualannya masi dilingkup Enrekang saja dek karena kendalanya tidak ada yang membantu memasarkan diluar jaringan kami masih kurang diluar bagus kalau ada yang membantu memasarkan diluar seperti dimakassar atau kalau bisa dikenal diseluruh penjuru nusantara itusi harapan kami kedepannya dek kan ini usaha yang digagas perempuan sangat bagus sekali tinggal yah bagaimana ada jaringan diluar begitu”
(HTU, 43 Tahun, Ketua Wirausaha, 17 Maret 2018).

Adapun yang disampaikan oleh informan di atas berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh informan sebelumnya bahwa masih ada beberapa perempuan di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya berkembang karena di akibatkan oleh kurangnya akses luar daerah yang bisa diajak bekerja, sama hal demikian menjadi salah satu faktor sehingga kurang berkembang beberapa usaha perempuan di Kabupaten Enrekang.

D. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Pemberdayaan Perempuan

a) Faktor Pendukung

Pada pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan terdapat beberapa hal yang dapat membantu berjalannya program yang dilaksanakan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Enrekang yang memuat program, kebijakan yang disahkan oleh Bupati Enrekang diharapkan semua pihak ikut serta berpartisipasi dalam perumusan kebijakan Strategi Pemberdayaan Perempuan. Adapun beberapa hal di bawa ini yang membantu berjalannya pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu;

1) Melakukan Sosialisasi

Pendekatan Sosialisasi tentang strategi pemberdayaan perempuan perlu dilaksanakan sebagai upaya mendorong kesadaran perempuan untuk lebih baik dan lebih maju. Aspek penting menyangkut strategi sosialisasi ini adalah pengembangan sumber daya yang berjangka panjang, berkesinambungan dan terciptanya kesejahteraan. Sosialisasi pada dasarnya sosialisai berkaitan dengan bagaimana meningkatkan pemahaman individu terhadap sesuatu yang baru.

Sosialisasi sebagai suatu proses penanaman, transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi-generasi lainnya dalam sebuah kelompok dan masyarakat. pada proses sosialisasi di ajarkan peran-peran yang dapat dilakukan oleh kelompok dan individu, sebagaimana yang di sampaikan oleh narasumber sebagai berikut;

“setiap 2 bulan disini kami dari Dinas pemberdayaan perempuan selalu melakukan sosialisasi keliling kecamatan menyampaikan sosialisasi kepada perempuan agar supaya perempuan juga bisa ikut terlibat dalam kegiatan dan kebijakan pemerintah sama seperti laki-livitas yang karena saya sampaikan itu ke mereka eee,, usahakan juga kita yang perempuan ini punya nilai dalam artian kita memiliki aktivitas yang bisa kita gunakan sebagai wadah mencari rezeki membantu suami”

(SWB, 51 Tahun, Kepala DP3A, 12 April 2018).

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan setiap bulan sosialisasi bertujuan untuk merubah cara pandang perempuan agar lebih baik dan lebih produktif. Melalui sosialisasi diharapkan dapat merubah mindset berpikir perempuan ke arah yang lebih baik sebab keberhasilan perempuan dalam perannya dimasyarakat merupakan tujuan dari pemberdayaan perempuan, sebagaimana yang disampaikan oleh informan berikut;

“sebenarnya kalau dibilang sosialisasi bagus kalau tersistmatis kalau hanya dua bulan sekali dan setelah itu sudah tidak ada tindak lanjutnya sehingga kurang maksimal. Tapi kembali lagi kan di Enrekang ini berapa memang kecamatan lain lagi kalau bicara desa. Cuma kalau saya bagus kalau sering-sering”

(RNI, 27 Tahun, Masyarakat, 23 April 2018).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa keinginan masyarakat agar sosialisasi dilakukan jangan hanya sekali sebulan dan harus ada tindak lanjut setelahnya. Tujuannya untuk tidak lanjut, dan mengevaluasi dari sosialisai sebelumnya agar ada perubahan yang dapat dirasakan oleh perempuan sehingga kedepannya harapan mereka dapat diwujudkan melalui kesadaran dan pemahaman yang lebih baik.

2) Partisipasi Perempuan

Hikmat (2001) konsep pemberdayaan terhadap wacana pembangunan masyarakat selalu di hubungkan dengan konsep partisipasi, mandiri, jaringan kerja, dan keadilan. Satu diantara prinsip tersebut merupakan prinsip partisipatif. Dalam prinsip ini ditekankan bahwa semua lapisan masyarakat baik laki-laki dan perempuan terlibat secara aktif dalam setiap proses pembangunan.

Melalui program pembangunan yang mengarah pada partisipatif tersebut diharapkan semua elemen dalam masyarakat dapat secara aktif ikut serta bersama-sama berpartisipasi dengan cara mencurahkan pemikiran dan sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhannya sendiri.

Dari gagasan tersebut di atas berikut menurut informan;

“pemberdayaan perempuan orientasinya untuk keberdayaannya kaum perempuan sehingga partisipasi perempuan dalam melaksanakan program kegiatan yang dilakukan menjadi tujuan kami. Mereka juga sangat membantu ketika ada kegiatan yang dilakukan oleh dinas pemberdayaan. mereka ikut serta mensukseskan dan juga menawarkan kegiatan yang mereka ingin lakukan”

(SWB, 51 Tahun. Kepala DP3A, 12 April 2018).

Dari uraian diatas menunjukkan bahawa pelaksanaan dari proses strategi pemberdayaan perempuan dilakukan untuk meningkatkan kualitas perempuan di Kabupaten Enrekang, melalui kegiatan yang dilakukan menjadi harapan dinas pemberdayaan perempuan agar supaya perempuan lebih aktif berperan di masyarakat.

Partisipasi perempuan merupakan penopang keberhasilan dari tujuan yang akan di capai, melalui partisipasi perempuan diharapkan dapat lebih meningkatkan potensi yang dimiliki, selanjutnya menurut salah satu masyarakat;

“iya dek saya memang tidak bergabung dalam kelompok tani, kelompok usaha putri tapi kalau ada kegiatan dari dinas pemberdayaan perempuan seperti seminar dikantor camat, sosialisasi di masyarakat saya biasa datang karena pembahasannya juga kena apa lagi tentang perempuan makanya saya biasa ikut kalau ada lagi kegiatannya”
(HYT, 46 Tahun, Masyarakat, 30 April 2018).

Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah ada kesadaran perempuan untuk ikut dalam kegiatan yang dilaksanakan hanya saja mereka tidak bergabung dalam kelompok perempuan.

3) Kerja sama lintas sektor

Sebagian dari masalah perempuan adalah merupakan masalah yang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan dari sektor lain sehingga upaya ini harus secara strategis ikut serta melibatkan sektor-sektor terkait. Isu utama tersebut adalah bagaimana upaya peningkatan kerjasama yang baik dengan lintas sektor sehingga dapat lebih efektif dan lebih efisien karena kerjasama dari berbagai lintas sektor dalam proses kegiatan pembangunan selama ini banyak yang berhasil, termasuk program yang berkaitan dengan strategi pemberdayaan perempuan di setiap daerah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan perempuan;

“selama ini Alhamdulillah dari berbagai sektor banyak membantu kami dek mereka banyak mensupport seperti dari kepolisian, bidang kesehatan, BKKBN, pemerhati perempuan dan beberapa LSM yang juga banyak berkontribusi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Enrekang termasuk kalau pelatihan dan sosialisasi di kecamatan memang harus ada kerja sama yang baik supaya keberhasilan program dan

keberhasilan perempuan juga dirasakan oleh semua perempuan di kabupaten enrekang khususnya”
(SWB, 51 Tahun, Kepala DP3A, 12 April 2018).

Implikasi strategi pemberdayaan perempuan adalah peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, resep mengenai strategi pemberdayaan perempuan adalah memanfaatkan setiap peluang dengan melibatkan setiap sektor yang ada. partisipasi dan keberhasilan diperoleh dari kerja sama antara tim dan pendukung lainnya.

Selanjutnya pemaparan TST bahwa;

“selanjutnya kerja sama dari semua lembaga-lembaga sosial sangat membantu kami sehingga selama ini pelaksanaan dibidang pemberdayaan perempuan tidak kewalahan karena teman-teman yang aktif di lembaga-lembaga tertentu sangat antusiasme dan sangat mendukung pemberdayaan perempuan. Kedepannya harapan kami semoga perempuan di Kabupaten Enrekang lebih maju, aman dan sejahtera. Aamiin
(TST,49 Tahun, Kepala seksi perlindungan dan pemberdayaan perempuan, 20 April 2018).

Terkait dengan hal itu keterlibatan lembaga-lembaga dan LSM serta antusiasmenya dapat menjadi power sehingga kedepannya ada perubahan yang dapat dirasakan oleh perempuan dan jauh dari ketertinggalan, terhindar dari kekerasan dalam rumah tangga, pergaulan bebas sehingga perempuan mendapatkan tempat dan peran dalam semua bidang kehidupan.

a. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah hal-hal yang menghambat proses strategi pemberdayaan perempuan, setiap metode yang digunakan tentunya ada pendukung dan penghambatnya. Adapun beberapa yang faktor yang menghambat strategi pemberdayaan perempuan di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak di Kabupaten Enrekang yaitu;

1) Kurangnya kesadaran perempuan

Tingkat kesadaran perempuan akan menimbulkan partisipasi untuk ikut mengelola dan terlibat. Kesadaran akan pentingnya untuk membawa diri atau kelompok ikut serta merupakan kemampuan untuk bertindak dalam keberhasilan keterpaduan yang teratur untuk menanggapi kondisi yang terjadi di lingkungan sehingga ada kesadaran atau keinginan bertindak sesuai dengan logika dari yang dikandung oleh kondisi lingkungan tersebut Adjid (1985).

Terkait dengan gagasan di atas berikut pernyataan salah satu informan;

“tingkat kesadaran perempuan terbilang minim dek, sudah beberapa kecamatan yang saya datangi melakukan kegiatan, sosialisasi, dll tapi memang kurang sekali yang mau terlibat, inilah kendalanya kita tapi sudah ada beberapa yang memang sudah mulai terlihat sudah aktif dan sudah banyak yang vocal kalau ada pertemuan didalam dan diluar daerah”
(TST, 49 Tahun, Kepala bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan 20 April 2018)

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kesadaran perempuan untuk ikut turut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan masih kurang dimana secara umum penentu keberhasilan yang ditargetkan jauh dibawah rata-rata rasionalnya sehingga ditemukan salah satu agenda permasalahannya adalah indeks kualitas sumber daya yang rendah berakibat *output* yang ingin dicapai.

selanjutnya ungkapkan salah satu informan TST yaitu;

“*Pura Takitamo Aje Dikka* bagaimana perempuan disini mayoritas petani dek dan lebih banyak yang tidak berpendidikan apalagi kalau kayak saya dek mau kerja *tatta unaki* jadi petani, saya lebih suka begini saja tidak repot harus ikut kegiatan ini dan itu” (RNI, 27 Tahun, Masyarakat, 23 April 2018).

Terdapat kurangnya pemahaman perempuan tentang tujuan peningkatan kapasitas diri mereka sebagaimana ada beberapa perempuan beranggapan bahwa karena tidak berpendidikan mereka tidak layak sehingga mereka malas terlibat dan hanya tahu tentang bertani sehingga menjadi penghambat mereka untuk lebih maju dan berkembang.

2) Kurangnya Sarana dan Prasarana

Pada dasarnya sarana dan prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu proses pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana merupakan suatu kegiatan yang sangat penting, karena keberadaannya akan sangat mempengaruhi tujuan yang akan dicapai. Untuk itu, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat mendukung dan harus sangat di perhatikan karena mempunyai pengaruh yang sangat besar.

Menurut Djoyowiriono (2005) Secara rinci ada beberapa tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyesuaikan apa saja fasilitas yang dibutuhkan sebagai pendukung terlaksananya tujuan.
2. Untuk mengupayakan tujuan dan pemakaian sarana dan prasarana secara tepat dan efisien.
3. Mengupayakan cara pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi baik dan siap pakai setiap

kali diperlukan. Selaras dengan gagasan di atas berikut hasil wawancara peneliti dengan Ketua Kelompok Tani;

“salah satu yang menjadi faktor penghambat sebenarnya dari sarana dan prasarananya dek, kalau adakan kegiatan pelatihan harus ada mentoring, harus ada alat yang digunakan seperti menjahit harus ada mesin penjahit yang digunakan banyak perempuan disini mau belajar kursus menjahit tapi susah karena tidak ada alatnya, saya juga tidak tau harus bagaimana karena ini juga desakan dari mereka”

(NRH, 53 Tahun, Ketua Kelompok Tani, 14 April 2018).

Sesuai dengan penuturan NRH diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi kaum perempuan adalah kurangnya sarana dan prasarana, mereka ingin mengembangkan minat mereka tapi ada banyak hal yang belum sepenuhnya memadai termasuk diantaranya sumber daya, sarana dan prasaran.

“seharusnya ada dari keceamatan atau langsung dari kabupaten yang memfasilitasi kami yang Desa apa lagi jauh dari kecamatan dek kami mau sekali ada keterampilan tapi sampai sekarang kami belum pernah ada yang datang memberikan keterampilan”

(SRN, 41 Tahun, Masyarakat, 17 April 2018).

Selaras dengan pernyataan NRH sebelumnya menurut SRN dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan dan keterampilan untuk perempuan belum sepenuhnya merata dilihat dari beberapa hal yaitu masih ada desa yang belum dijangkau dan diberdayakan kaum perempuannya hal itu menjadi faktor penghambat kemajuan dan kesejahteraannya.

3) Beban dan Peran Ganda

Beban dan peran ganda perempuan adalah tugas rangkap yang dijalani seorang seorang perempuan (lebih dari satu peran) yaitu sebagai ibu rumah tangga, dan sebagai orang tua anak, sebagai istri dari suami dan peran sebagai pekerja yang

mencari nafkah membantu suaminya dalam bidang ekonomi keluarga. Beban ganda diukur sesuai dengan total waktu yang digunakan dan dilakukan perempuan menikah yang bekerja untuk mengerjakan pekerjaan domestik dan publik. Sejalan dengan hal itu berikut pemaparan informan masyarakat;

“kita taumi dek bagaimana perempuan selain harus mengurus rumah tangga kita juga harus bekerja diluar rumah jadi harus pintar-pintar saja membagi waktu intinya bagus semua dek kita juga mau berkembang dan maju karena ikut kegiatan semisal pelatihan keirausahaan bersama perempuan juga ada manfaat yang kita dapatkan yah paling tidak kita dapat ilmunya”
(HTU 43 Tahun, Ketua Wirausaha, 17 Maret 2018)

Sebagaimana penuturan informan diatas bahwa kendala yang yang dihadapi adalah waktu dan kesempatan terlebih mereka banyak menghabiskan waktu mengurus rumah tangga dan pekerjaan yang lain sehingga beban mereka serta waktu yang ada kadang menjadi faktor penghambat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan.

“kendalanya sebenarnya banyak dek karena saya juga ngajar di SD pulang sudah pasti sore, sore sudah jelas harus di dapur lagi jadi kadang tidak ikut kalau ada pertemuan di kecamatan atau ada kegiatan dari dinas pemberdayaan, Cuma kalau pada waktu luang saya tidak ada mata pelajaran saya biasa ikut itupun kalau hari minggu”
(NRL, 25 Tahun, Masyarakat, 30 April 2018)

Dari pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi oleh perempuan adalah waktu dan pekerjaan mereka seperti yang disampaikan oleh NRL yang selain sebagai ibu rumah tangga juga sebagai seorang pengajar sehingga waktu untuk ikut terlibat kurang atau bahkan tidak ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui cara observasi dan wawancara oleh penulis dengan judul “Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang”, beberapa hal yang menjadi kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Enrekang belum bisa dikatakan maksimal dan berhasil dilihat dari angka kekerasan perempuan yang terus mengalami peningkatan diakibatkan karena faktor didalam dan diluar lingkungan keluarga dan masyarakat, serta meningkatnya angka kekerasan perempuan yang tergolong jauh dari kata sejahtera. Hal ini menjadi salah satu penghambat keberhasilan kaum perempuan sebagaimana masih banyak perempuan di Enrekang yang belum berdaya.
2. Strategi pemberdayaan perempuan yang dilakukan dengan cara sosialisasi, memberikan pemahaman dengan cara pembentukan kesadaran secara menyeluruh belum merata dimasyarakat, serta sarana dan prasarana yang tidak merata dan memadai dan bahkan tidak kena sasaran terhadap kelompok perempuan sehingga menghambat kegiatan yang menunjang keberhasilan perempuan sebagaimana sangat berpengaruh pada keberhasilan kaum perempuan di Kabupaten Enrekang.

3. Kurangnya kesadaran perempuan terhadap pelaksanaan dan kebijakan yang ada berdampak besar pada peran perempuan yang tergolong kecil serta berakibat pada marginalisasi, dan kekerasan.
4. Kegiatan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Enrekang sudah baik akan tetapi dilihat dari kondisi kesadaran perempuan serta sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya mendukung sehingga menjadi penghambat keberhasilannya.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan yang penulis tuangkan di atas tentang Strategi Pemberdayaan Perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang” adapun saran-saran penulis sebagai berikut

1. Mengenai sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang mengenai strategi pemberdayaan perempuan sebaiknya proses yang dilaksanakan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, kemudian menjangkau semua daerah khususnya daerah yang banyak terjadi kasus KDRT, pelecehan, penganiayaan terhadap perempuan, sehingga dapat merubah kondisi yang terjadi.
2. Pembinaan terhadap perempuan harus terus di tingkatkan termasuk bimbingan konseling dan pengembangan kelompok usaha dengan begitu perempuan dapat memanfaatkan potensi dan mengembangkan minat dan keahlian mereka melalui wirausaha dengan begitu perempuan lebih mandiri dan bisa mencukupi kebutuhan Ekonominya.

3. Dari Pihak pemberdayaan perempuan, pemerintah dan masyarakat harus turut andil dalam proses pelaksanaan agar supaya semua berjalan dan terarah sesuai tujuan yang ingin dicapai. Selain itu kerja sama yang baik dari semua pihak merupakan langkah yang baik agar tercapai apa yang di harapkan.
4. Memeratakan keterlibatan perempuan, mengajak perempuan lebih produktif dan inovatif agar perempuan memiliki kualitas diri dengan begitu dapat meminimalisir/menghilangkan subordinasi, stereotipe, marginalisasi dan kekerasan baik dalam lingkup rumah tangga maupun di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Isbandi Adi 2013. *Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pustaka pelajar
- Asang, Sulaiman, 2012. *Membangun Sumber Daya Berkualitas*. Makassar: Brlian Internasional Surabaya
- Astuti, Marwanti.2002. *Gender dan Diskriminasi Perempuan*. Bumi aksara. Bandung
- Bungin, Burhan, 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Rajawali Pers.
- Bachri Bachtiar S. 2010. *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif*. Universitas Negri Surabaya. Surabaya.
- Basuki Johannes, 2013. *Budaya Pelayanan Publik*. Jakarta: Media Pustaka.
- David, 2011. *Membangun Sumber daya Manusia Berkualitas*. Brilian Internasional Surabaya.
- Elson, 1991. *Indikator Pelaksanaan Strategi Pemberdayaan Perempuan*. diakses dari www.blogsplus.com/?/-indikator-pemberdayaan-perempuan.com
- Lewis Artur, W. 1885. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta
- Suharto Edi, 2000. *Metode Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Jurnal Perempuan untuk Politik: Panduan Tentang Partisipasi Perempuan dalam Politik dan pembangunan, 2006:11-115.
- Havidz Aima, dkk, 2015. *Enterepreneurship dan peluang usaha*. Jakarta.
- Hasibun, 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muljana, 1995. *Perencanaan Pembangunan Nasional*, Jakarta: Universitas Indonsian.
- Nugroho Riant. 2012. *Public Policy*. PT Elex Media Komputindo: Gramedia. Jakarta
- Nugroho,Riant. 2008. *Gender dan Adminsitrasi Publik*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Pratama, Crisvi, 2013. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan*, Vo. 1 No. 1-2 Januari-April 2018:14-16 <http://bogorplus.com/index.php/item/6963->

memberdayaan-kaum-perempuan-melalui-pembinaan-dan-pengembangan-organisasi-perempuan.

Peraturan Bupati Enrekang Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Enrekang.

Ruslan, Murniati, 2010. Pemberdayaan Perempuan Berbasis Gender: jurnal Pemberdayaan Perempuan: Konsep dan Strategi 92 Musawa, Vol. 2, No. 1, Januari 2018:79-96.

Siagian, Sondang P. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh belas. Jakarta: Bumi Aksara

Salusu J, 2006. *Manajemen Strategi*. Jakarta: Pustaka Pelajar, In Media.

Sugihastuti, 2007. *Gender dan Inferioritas Perempuan*: Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi 1, Bandung: Alfabet.

Siagian, 2004. *Manajemen Strategi Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suyono, 2001. Kualitas Pemberdayaan Perempuan di akses dari https://kalteng.go.id/INDO/Pemberdayaan_Perempun/ pada tanggal 09 Maret 2018.

Setyasih. 1998. Partisipasi Perempuan Terhadap Pembangunan Daerah. *jurnal ilmu administrasi publik*. Vol. 14. No. 3 (Januari)

UNDP, 2001, *Konsep Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas*. Dalam asang sulaiman, Makassar: Brlan Internasional.

Fakih, Mansour, 1996. *Analisis Gender dalam Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wahib, 2012. Langkah langkah yang dilakukan dalam pemberdayaan perempuan. http://wahib.co.id/langkah-langkah_yang_dilakukan_serta_faktor-faktor_pendukung_dan_penghamba_pemberdayaan_perempuan/htm.

http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1943457-pengertian_sosialisasi/diakses_pada_tanggal_22_April_2018.